

MEMBANGUN FONDASI KEUANGAN: PENGANTAR PRAKTIS UNTUK AKUNTANSI DALAM BISNIS



Penulis :
Nenny Syahrenny
Rizal Zaelani
Rinda Fithriyana
Ali Tofan
Wedia Hastuti

MEMBANGUN FONDASI KEUANGAN: PENGANTAR PRAKTIS UNTUK AKUNTANSI DALAM BISNIS

**Nenny Syahrenny
Rizal Zaelani
Rinda Fithriyana
Ali Tofan
Weddia Hastuti**



GET PRESS INDONESIA

MEMBANGUN FONDASI KEUANGAN: PENGANTAR PRAKTIS UNTUK AKUNTANSI DALAM BISNIS

Penulis :

Nenny Syahrenny
Rizal Zaelani
Rinda Fithriyana
Ali Tofan
Wedida Hastuti

ISBN : 978-623-125-441-2

Editor : Diana Purnama Sari, M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Membangun Fondasi Keuangan: Pengantar Praktis Untuk Akuntansi Dalam Bisnis ini.

Buku Ini Membahas Pengantar Akuntansi Dan Prinsip Dasar, Penyusunan Laporan Keuangan, Akuntansi Manajemen, Pajak Dan Perpajakan, Audit Dan Pengendalian Internal.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI DAN PRINSIP DASAR. 1	
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi dalam konteks bisnis	2
1.2.1 Definisi Akuntansi.....	2
1.2.2 Ruang Lingkup Akuntansi	4
1.3 Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi (Aset, Liabilitas dan Ekuitas)	6
1.4 Peran Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis	7
DAFTAR PUSTAKA.....	10
BAB 2 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	13
2.1 Definisi Laporan Keuangan.....	13
2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan.....	13
2.3 Urutan Jenis Laporan Keuangan	15
2.3.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	15
2.3.2 Laporan Laporan Laba Rugi.....	20
2.3.3 Laporan Arus Kas.....	27
2.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	33
2.3.5 Catatan Atas Laporan Keuangan.	35
DAFTAR PUSTAKA.....	39
BAB 3 AKUNTANSI MANAJEMEN	41
3.1 Pengertian dan Perkembangan Akuntansi Manajemen..	41
3.2 Konsep Dasar dalam Akuntansi Manajemen.....	42
3.2.1 Biaya dan Perilaku Biaya.....	42
3.2.2 Penganggaran dan Perencanaan Keuangan	43
3.2.3 Analisis Break-Event dan Titik Impas	43
3.3 Pengembalian Keputusan Manajerial	43

3.3.1 Informasi Relevan dalam Keputusan	43
3.3.2 Analisis Biaya-Manfaat	44
3.3.3 Penganggaran Modal	44
3.4 Pengendalian dan Pengukuran Kinerja.....	45
3.4.1 <i>Balanced Scorecard</i>	45
3.4.2 Pusat Biaya dan Pusat Laba	45
3.4.3 <i>Six Sigma</i> dan <i>Lean Management</i>	45
3.5 Akuntansi Biaya dan Sistem Pengendalian Biaya.....	46
3.5.1 Penentuan Harga Pokok Produksi.....	46
3.5.2 Akuntansi Biaya Standar dan Penyimpangan	46
3.5.3 <i>Activity-Based Costing</i> (ABC)	46
3.5.4 <i>Target Costing</i> dan <i>Kaizen Costing</i>	47
3.6 Perencanaan Strategis dan Risiko	47
3.6.1 Peran Akuntansi Manajemen dalam Strategi	47
3.6.2 Analisis SWOT.....	48
3.6.3 Manajemen Risiko dan Keberlanjutan	48
3.7 Teknologi dan Peran Strategis dalam Akuntansi Manajemen.....	48
3.8 Studi Kasus.....	49
3.9 Kesimpulan	50
DAFTAR PUSTAKA	51
BAB 4 PAJAK DAN PERPAJAKAN.....	53
4.1 Pendahuluan	53
4.4.1 Pajak Penghasilan (PPh).....	53
4.4.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	57
4.4.3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	60
4.4.4 Pajak Daerah.....	64
4.4.5 Pajak Internasional	66
DAFTAR PUSTAKA	69
BAB 5 AUDIT DAN PENGENDALIAN INTERNAL	71
5.1 Apa Itu Audit Internal?	71
5.2 Lima Konsep Audit Internal	72

5.3 Pentingnya Audit Internal Bagi Perusahaan	75
5.4 Kebutuhan Manajemen akan Pengendalian Internal	76
5.4.1 Apa itu Pengendalian Internal?	77
5.4.2 Memahami Pengendalian Internal	77
5.4.3 Pentingnya Pengendalian Internal	78
5.4.4 Komponen Pengendalian Internal	78
5.4.3 Keterbatasan Pengendalian Internal	80
5.5 Jenis Pengendalian Internal	80
5.6 Perbedaan antara Audit Internal dengan Pengendalian Internal.....	81
5.7 Kesimpulan.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENGANTAR AKUNTANSI DAN PRINSIP DASAR

Oleh Nenny Syahrenny

1.1 Pendahuluan

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, dunia bisnis dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Akuntansi muncul sebagai salah satu disiplin ilmu yang tidak hanya sekedar melakukan pencatatan transaksi, namun juga memainkan peran penting dalam strategi dan membantu dalam membuat keputusan bisnis. Peran akuntansi sebagai bahasa bisnis, yang menyajikan informasi keuangan penting bagi *stakeholder*, antara lain manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang akuntansi sangat penting untuk menjamin keberhasilan entitas/ perusahaan.

Bab ini akan membahas mengenai definisi akuntansi dalam konteks bisnis. Akuntansi diartikan sebagai proses sistematis dalam mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi keuangan untuk membantu *user* dalam membuat keputusan. Ruang lingkup akuntansi mencakup berbagai aktivitas yang tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data keuangan yang diperoleh. Dari akuntansi keuangan yang berfokus pada laporan eksternal hingga akuntansi manajemen yang lebih bersifat internal, setiap aspek memiliki tujuan dan fungsi yang saling melengkapi.

Selanjutnya adalah prinsip dasar akuntansi yang menjadi landasan bagi praktik akuntansi yang baik. Prinsip-prinsip akuntansi, seperti entitas ekonomi, keberlangsungan usaha, dan

akrual, membentuk kerangka kerja yang memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun adalah akurat dan dapat diandalkan. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi tidak hanya penting untuk menjaga transparansi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan menerapkan prinsip dasar yang konsisten, entitas dapat menjaga integritas laporan keuangan dan membangun kepercayaan diantara *stakeholder*.

Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai peran akuntansi dalam bisnis. Akuntansi berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk mencatat dan melaporkan, tetapi juga sebagai sarana untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Informasi keuangan yang tepat dan relevan memungkinkan manajer untuk membuat keputusan strategis, mengidentifikasi peluang, serta mengelola risiko dengan lebih baik. Dengan menggunakan analisis keuangan, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan jangka panjang.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang definisi, ruang lingkup, prinsip dasar, dan peran akuntansi dalam bisnis akan memberikan wawasan yang sangat berharga bagi para praktisi, akademisi, dan *stakeholder* lainnya. Dengan memahami seluruh dimensi akuntansi, diharapkan pembaca dapat mengaplikasikan pengetahuan ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pada entitas/ perusahaan mereka.

1.2 Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi dalam konteks bisnis

1.2.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi secara terminologis dari kata *accounting* artinya menghitung dan mempertanggungjawabkan, digunakan di seluruh

kegiatan bisnis untuk membantu membuat keputusan sehingga akuntansi juga disebut sebagai bahasa bisnis (Sabrina, 2013). Secara umum akuntansi didefinisikan sebagai pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan *stakeholder* lainnya dalam mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya dalam bisnis, organisasi, dan entitas pemerintah (Sahrullah, Abubakar and Khalid, 2022). Akuntansi dalam bisnis merupakan alat penting dalam mengambil keputusan yang efisien, mengendalikan keuangan, dan memastikan *going concern* perusahaan dengan memberikan informasi keuangan yang akurat dan transparan (Morales Espinoza and Morales Espinoza, 2019). Dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa akuntansi merupakan “bahasa bisnis” yang mempunyai peran penting dalam mencatat, menghitung, mempertanggungjawabkan dan menyajikan informasi keuangan. Akuntansi membantu *stakeholder* seperti manajer, investor, pemasok, pemilik, pesaing, kreditur, pemerintah, masyarakat dan lainnya dalam membuat keputusan. Akuntansi bukan hanya sebagai alat saja dalam mengelola keuangan namun juga sebagai deteksi *going concern* usaha dari perusahaan.

Akuntansi dalam konteks bisnis mencakup beberapa komponen kunci yang penting untuk mengelola keuangan dan membuat keputusan yang efektif. Komponen-komponen ini termasuk akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan integrasi dukungan analitis untuk meningkatkan keamanan ekonomi (Sergeevna, 2023). *Output* dari akuntansi keuangan meliputi laporan keuangan yang memberikan pandangan komprehensif tentang kesehatan keuangan bisnis. Entitas harus memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan, serta memastikan adanya transparansi dan komparabilitas dalam pelaporan keuangan.

Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi bagi internal *user* yang membantu dalam perencanaan, kendali biaya, dan proses pengambilan keputusan seperti penganggaran dan analisis biaya. Kemudian dalam manajemen biaya melibatkan menganalisis perilaku biaya dan menerapkan strategi untuk alokasi sumber daya dan meningkatkan efisiensi.

1.2.2 Ruang Lingkup Akuntansi

Dengan memahami ruang lingkup akuntansi, entitas/perusahaan dapat mengelola informasi keuangan secara efektif, mendukung pengambilan keputusan, dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berikut ruang lingkup akuntansi dalam konteks bisnis di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa komponen:

- 1. Akuntansi Keuangan.** Mencakup mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan kemudian memberikan informasi kepada *stakeholder* melalui laporan keuangan yang disusun. Laporan keuangan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia ada 4 pilar (Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2022) yaitu SAK Internasional, SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAKEP) yang menggantikan SAK Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di 2025, dan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM). Jika entitas/perusahaan mempunyai akuntabilitas publik maka harus menggunakan SAK Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya, kecuali jika berdasar peraturan yang berlaku yang mengharuskan entitas menggunakan SAK Internasional. Jika entitas tidak memiliki akuntabilitas publik maka dapat menggunakan SAKEP/ SAK ETAP, namun jika entitas memilih menggunakan SAK

Indonesia diperbolehkan. Kemudian untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah dapat menggunakan SAK yang paling sederhana yaitu SAK EMKM. Perlu diperhatikan jika entitas telah memilih menggunakan SAK yang lebih tinggi tidak dapat merubah ke SAK yang lebih rendah. Misal, entitas telah memutuskan menggunakan SAK Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya kemudian ingin merubah menggunakan SAK EP/ SAK ETAP, tidak diperbolehkan. Namun jika merubah dari SAK EP/ SAK ETAP ke SAK Indonesia maka diperbolehkan. Untuk entitas yang melakukan transaksi syariah dapat mengacu pada SAK Syariah dalam pengakuan dan pencatatannya namun penyajiannya tetap mengacu ke salah satu dari 3 pilar tersebut (SAK Indonesia, SAK EP/ SAK ETAP dan SAK EMKM).

2. **Akuntansi Manajemen.** Menyediakan informasi untuk internal manajemen dalam membantu Manajer membuat keputusan perencanaan (*planning*) dan pengendalian (*controlling*). Prinsip-prinsip akuntansi manajemen berdasarkan pengukuran beban dan kinerja.
3. **Akuntansi Biaya.** Fokus pada pengumpulan dan analisis biaya yang terkait dengan produksi. Informasi yang dihasilkan Akuntansi Biaya penting dalam mengendalikan biaya dan merupakan sumber informasi bagi Akuntansi Manajemen.
4. **Akuntansi Pajak.** Berhubungan dengan perhitungan pajak perusahaan yang merupakan kewajiban pemenuhan peraturan perpajakan. Informasi ini penting bagi pemerintah.
5. **Sistem Informasi Akuntansi.** Mengatur dalam pengumpulan, pengolahan dan pelaporan keuangan baik yang telah terintegrasi maupun yang belum.

6. Audit. Proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang obyektif mengenai kejadian/peristiwa ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh derajat kesesuaian antara asersi manajemen (laporan keuangan) dengan kriteria yang ditetapkan (SAK) dan melaporkannya pada pihak yang berkepentingan. Audit ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Dilakukan internal yaitu biasanya oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) perusahaan untuk melakukan pemeriksaan operasional. Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh badan independen untuk melakukan *general audit*.

1.3 Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi (Aset, Liabilitas dan Ekuitas)

Syarat untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas dan ekuitas didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari kerangka konseptual pelaporan keuangan. Asumsi dasar sebagai berikut:

- 1. Dasar AkruaI.** Prinsip ini menentukan bahwa pendapatan dan pengeluaran dicatat ketika diperoleh atau dikeluarkan tidak harus ketika uang tunai ditukar. Prinsip ini memberikan gambaran keuangan yang lebih akurat (Sigidov Y. Y., KHoruzhiy L. I., Kulikova L. L., 2024)
- 2. Kelangsungan Usaha.** Entitas dalam menyusun laporan keuangannya memperhatikan prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) dimana perusahaan yang didirikan tidak untuk jangka pendek namun selamanya, entitas akan terus beroperasi secara tidak terbatas (Mizak, 2018). Prinsip ini sangat penting bagi stakeholder karena mempengaruhi pemahaman mereka mengenai kesehatan keuangan serta keberlanjutan organisasi (Anton, 2020).
- 3. Konsep Entitas Bisnis.** Entitas dengan pemilik adalah 2 entitas yang berbeda. Meskipun entitas tersebut merupakan

badan usaha perorangan dimana pemilik yang langsung mengelola perusahaan tetap saja dipandang sebagai 2 entitas yang berbeda. Sehingga ketika terdapat transaksi dimana pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi maka harus dicatat sebagai piutang pemilik (pemilik mempunyai utang kepada perusahaan yang suatu saat harus dibayar). Konsep ini mengamanatkan bahwa catatan keuangan bisnis berbeda dari keuangan pemiliknya, memastikan pelaporan keuangan yang akurat (Cristy *et al.*, 2024).

1.4 Peran Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

Akuntansi mempunyai peranan dalam bisnis karena akuntansi memberikan informasi yang berguna dari data transaksi yang terjadi. Peran akuntansi bagi perusahaan diantaranya (Wardani and Wardana, 2022):

- 1. Sumber informasi keuangan.** Transaksi yang terjadi dalam perusahaan dicatat dan kemudian diringkas dan dilaporkan menjadi laporan keuangan. Pencatatan transaksi tentu saja yang berhubungan dengan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dari menganalisa transaksi, pencatatan kedalam jurnal, *posting* ke buku besar sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi dapat memproses data dan transaksi yang berguna dalam merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis (Legina and Sofia, 2020).
- 2. Menganalisis usaha.** Transaksi yang telah dicatat kemudian diolah menjadi sebuah informasi yang berguna yaitu laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan menggambarkan aset, liabilitas dan ekuitas perusahaan per

akhir periode sedangkan laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan untuk periode tertentu. Informasi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada pemilik apa yang terjadi pada perusahaannya. Dengan melakukan analisa laporan keuangan dapat membandingkan dengan periode sebelumnya. Perusahaan dapat juga menetapkan standar ataupun target sehingga dapat dibandingkan dengan kondisi yang terjadi sesungguhnya, jika terdapat varians yang besar maka dapat dievaluasi apa yang harus dilakukan.

3. **Merencanakan bisnis.** Menggunakan akuntansi sebagai perencanaan bisnis erat kaitannya dengan penggunaan anggaran. Anggaran dibuat dari periode sebelumnya sehingga jika tidak memenuhi anggaran maka perlu dievaluasi kegiatan bisnis apakah sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Perencanaan bisnis ini seperti proyeksi penjualan, pembukaan cabang baru, atau inovasi produk. Dengan adanya informasi yang disediakan akuntansi, pemilik dapat mengambil langkah-langkah strategisnya untuk masa depan perusahaan sehingga mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
4. **Komunikasi dengan *stakeholder*.** Laporan keuangan selain berguna untuk pemilik dan internal perusahaan, juga berguna bagi pihak lain yaitu konsumen, pemasok, investor, pemerintah, pesaing, kreditur, dan masyarakat. Investor membutuhkan informasi keuangan dalam mengambil keputusan investasinya. Tidak mungkin seorang investor memberikan investasinya tanpa informasi yang akurat dan *terupdate*. Dalam hubungannya dengan pemerintah, laporan keuangan tersebut dipakai untuk melaporkan kewajiban perusahaan yaitu terutama dalam hal perpajakan. Pesaing juga membutuhkan informasi keuangan perusahaan lain,

tujuannya untuk membandingkan kinerja perusahaan mereka. Kreditur jelas sekali membutuhkan informasi keuangan perusahaan yang akan diberikan kredit. Kreditur mempertimbangkan kinerja perusahaan yang akan diberikan kredit apakah di masa depan kondisi keuangan perusahaan dapat melunasi utang yang telah diberikan. Pemasok dalam hal ini sebagai penyedia barang atau jasa ke perusahaan membutuhkan informasi keuangan ketika perusahaan membeli produk atau jasa dengan sistem kredit. Pemasok harus memutuskan apakah dapat memberikan utang pembelian kepada perusahaan dengan melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Informasi keuangan perusahaan dibutuhkan masyarakat untuk melihat kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kepedulian terhadap lingkungan seperti akuntansi karbon. Dengan semakin banyaknya diterapkan akuntansi karbon akan menambah lahan penyerapan gas rumah kaca seperti hutan sehingga akan mengurangi dampak *global warming* (Rahmawati *et al.*, 2022).

5. **Pengambilan keputusan.** Dalam hal ini adalah pengambilan keputusan investasi perusahaan keluar. Perusahaan yang mempunyai dana kas menganggur (*idle cash*) akan melakukan investasi yang menguntungkan. Manajemen membutuhkan informasi keuangan agar dana perusahaan tidak serta merta digunakan untuk berinvestasi dan dari dana yang dimiliki akan digunakan untuk berinvestasi dimana. Keputusan memilih apakah saham, obligasi jangka pendek atau jangka panjang disesuaikan dengan dana yang dimiliki perusahaan dan kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, C. E. (2020) 'the Principle of Business Continuity – an Interdisciplinary Approach', *Bulletin of the Transilvania University of Brasov Series V Economic Sciences*, 13(62)(2), pp. 119–124. doi: 10.31926/but.es.2020.13.62.2.12.
- Cristy, F. *et al.* (2024) 'APPLICATION OF THE BUSINESS ENTITYCONCEPT TO THE FINANCIAL STATEMENTS OF SMES', *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, 2(June), pp. 1–7. doi: 10.31435/rsglobal.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI (2022) 'Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia', in *SAK Online IAI*. 1st edn. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, pp. 1–22.
- Legina, X. and Sofia, I. P. (2020) 'PEMANFAATAN SOFTWARE PEMBUKUAN AKUNTANSI SEBAGAI SOLUSI ATAS SISTEM PEMBUKUAN MANUAL PADA UMKM', *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 4(2), p. 172. doi: 10.31851/neraca.v4i2.4771.
- Mizak, A. (2018) 'DO OCENY ZAGROŽENIA KONTYNUACJI', *Roczniki Ekonomii i Zazadzania*, 10(46).
- Morales Espinoza, D. Y. and Morales Espinoza, J. M. (2019) 'La contabilidad un elemento indispensable en el desarrollo de las empresas', *Espí-ritu Emprendedor TES*, 3(2), pp. 49–68. doi: 10.33970/eetes.v3.n2.2019.136.
- Rahmawati, A. *et al.* (2022) 'PERAN AKUNTANSI KARBON PADA PERUSAHAAN DALAM PENCEGAHAN GLOBAL WARMING', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 17(2), p. 77. doi: 10.21460/jrak.2021.172.399.
- Sabrina, I. (2013) *KONTRIBUSI ISLAM TERHADAP AKUNTANSI*.
- Sahrullah, Abubakar, A. and Khalid, R. (2022) 'Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282', *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), pp. 325–336.

doi: 10.37531/sejaman.v5i1.2024.

Sergeevna, G. O. (2023) 'MAIN COMPONENTS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS', *Russian Journal of Management*, 11(3), pp. 451–459. doi: <https://doi.org/10.29039/2409-6024-2023-11-3-451-459>.

Sigidov Y. Y., KHoruzhiy L. I., Kulikova L. L., K. E. E. . (2024) *Fundamentals of accounting*. Moscow: Moscow: INFRA-M. doi: DOI: 10.12737/1851513.

Wardani, F. K. and Wardana, B. E. (2022) 'Prinsip Dasar dan Konsep Dasar Akuntansi', *Asian Journal of Management Analytics*, 1(2), pp. 125–136. doi: 10.55927/ajma.v1i2.1485.

BAB 2

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Oleh Rizal Zaelani

2.1 Definisi Laporan Keuangan

Definisi Laporan keuangan ialah keluaran dari sebuah siklus akuntansi, yang memberikan gambaran tentang bagaimana transaksi keuangan dicatat selama satu periode pelaporan keuangan serta digunakan untuk melaporkan kegiatan operasional yang dibebankan kepada manajemen atau investor perusahaan. Tujuan dari sebuah laporan keuangan ialah untuk memberi pengguna informasi tentang suatu posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan. PSAK 1 (IAI, 2017) dalam (Fadjrih Nur Asyik et al., 2021) menjelaskan bahwa laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan mencakup :

1. *Balance Sheet* atau Laporan posisi dari keuangan.
2. *Comprehensive Income Statement* atau Laporan rugi laba komprehensif.
3. *Statement of Owne* atau Laporan perubahan dari ekuitas.
4. Laporan dari arus kas.
5. Kebijakan system akuntansi serta catatan dari laporan keuangan.

2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan dapat digunakan bisa membantu investor serta kreditur dalam membuat keputusan untuk investasi maupun kredit. Selain laporan keuangan bisa membantu para investor maupun kreditur serta pihak lain mengevaluasi akan kekuatan serta kelemahan keuangan dari perusahaan, serta

likuiditas dan solvabilitasnya (Hery, 2009:31) dalam (Murniati Sitti et al., 2022). Tujuan dari sebuah laporan keuangan ialah untuk memberi informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta perubahan perusahaan pada orang-orang yang membuat keputusan dari kondisi ekonomi (IAI, 2019:1) dalam (Murniati Sitti et al., 2022).

Untuk membuat keputusan ekonomi yang bijaksana, pemangku kepentingan harus menerima laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban manajemen. Laporan ini mencakup pemahaman dan analisis keadaan keuangan dari suatu entitas saat tanggal tertentu, serta evaluasi kemampuan dari entitas untuk mewujudkan laba dari usaha dalam jangka waktu tertentu, pada kas maupun setara kas pada jangka waktu yang bisa dibuktikan. Hasil dari evaluasi menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi semua kewajibannya tepat waktu (Kartikahadi, dkk., 2012:46) dalam (Murniati Sitti et al., 2022).

Laporan keuangan akan tujuan umum juga bertujuan bisa menunjukkan suatu pertanggungjawaban manajemen tentang penggunaan kapabilitas yang dipercayakan pada mereka dan menyerahkan informasi mengenai posisi dari keuangan, kinerja, maupun arus kas perusahaan yang bisa bermanfaat untuk sebagian besar dari pengguna laporan keuangan dalam rangka mengambil suatu keputusan ekonomi, Rudianto (2017:6) dalam (Murniati Sitti et al., 2022), tujuan yang umum dari perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan ialah :

1. Memberikan suatu informasi yang bermanfaat bagi beberapa pengambil keputusan;
2. Memberikan suatu informasi yang bisa membantu para investor maupun kreditur pada saat ini maupun dimasa depan dalam penilaian suatu jumlah, waktu, serta ketidakpastian dari arus kas;

3. Memberikan suatu informasi yang bisa membantu investor serta kreditur pada saat ini, maupun masa yang akan datang untuk menilai suatu sumber daya suatu ekonomi, yang diklaim terhadapnya, dan perubahannya.

2.3 Urutan Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan ialah dokumen yang menyajikan suatu informasi penting mengenai kondisi kinerja, keuangan, serta arus kas perusahaan untuk satu periode tertentu. Sebuah Laporan keuangan memberikan informasi yang sangat penting bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajemen, kreditur, investor, serta pihak-pihak lain yang juga berkepentingan dengan perusahaan. Penyusunan serta penyajian suatu laporan keuangan harus mengacu standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan transparansi, akurasi, dan konsistensi.

Berikut ini adalah uraian mengenai urutan jenis laporan keuangan yang biasanya disusun dan dipublikasikan sama perusahaan:

2.3.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca ialah laporan yang menjabarkan keadaan suatu keuangan perusahaan selama suatu waktu tertentu. Untuk menunjukkan keadaan suatu keuangan tersebut, Anda harus membandingkan antara aktiva dengan kewajiban, yaitu kewajiban serta modal. Singkatnya, berapa besar kemampuan dari passiva untuk memenuhi kebutuhan dari aktiva. Tingkat kelancaran dan ketidaklancaran elemen atau komponen laporan neraca biasanya digunakan untuk membentuk kelompok (Sinaga & Doloksaribu Ardin, 2020).

Deskripsi: Laporan Posisi Keuangan, atau yang lebih dikenal sebagai Neraca, memberikan gambaran tentang keadaan keuangan perusahaan saat ini. Laporan ini mencerminkan apa

yang telah dimiliki (aset), apa yang menjadi kewajiban (liabilitas), serta hak pemilik (ekuitas) pada saat tertentu.

Tujuan: Neraca bertujuan untuk menunjukkan likuiditas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan. Untuk menilai risiko, investor dan kreditur memerlukan informasi ini dan stabilitas keuangan perusahaan.

Komponen Utama:

1. **Aset:** Terdiri dari aset lancar (seperti kas, piutang usaha, persediaan) dan aset yang tidak lancar, (seperti aktiva tetap/aset tetap, serta aset tidak berwujud, investasi jangka panjang.).
2. **Liabilitas:** Terbagi menjadi liabilitas jangka pendek (seperti beban akrual, utang usaha,) dan liabilitas jangka panjang (seperti utang bank jangka panjang,serta utang obligasi,).
3. **Ekuitas:** Termasuk modal saham, maupun saldo dari laba, tambahan dari modal disetor serta komponen pada ekuitas nya.

Elemen dari laporan Neraca:

1. *Assets/Aktiva*
Current asset/Aktiva Lancar:
 - a. *Cash/Kas*
 - b. *Securities/Surat berharga*
 - c. *Receivables/Piutang*
 - d. *Supply/Persediaan*
 - e. *Expenses paid in advance/Biaya dibayar dimuka*
 - f. *Equipment/Perlengkapan*

Long term investment / Investasi jangka panjang :

Tangible fixed assets/Aktiva tetap berwujud:

- a. *Equipment/Peralatan*
- b. *Building/Bangunan*

- c. *Land*/Tanah

Intangible Assets/Aktiva Tidak berwujud:

- a. *Patent*/Paten
- b. *Goodwill*/Nama baik
- c. *Franches*
- d. *Copyright*/Hak Cipta
- e. *Etc*/Dll

2. Liabilities/Kewajiban:

Current Liabilities/Kewajiban Lancar:

- a. *Accounts payable*/Utang dagang
- b. *Notes payable*/Utang wesel
- c. *Salary debt*/Utang gaji
- d. *Tax debt*/Utang pajak
- e. *Debt burden*/Utang beban
- f. *Debt burden*/Utang beban
- g. *Dividend payable*/Utang deviden

Long-term obligation/Kewajiban Jangka Panjang:

- a. *Bond debt*/Utang obligasi
- b. *Mortgage debt*/Utang hipotik
- c. *Long-term notes payable* /Utang wesel jangka panjang

3. Capital/Modal:

- a. *Capital stock*/Modal saham
- b. *Disagio of shares*/Agio/disagio saham
- c. *Retained earning*/Laba ditahan

Penyusunan Laporan Neraca datang dalam dua bentuk :

- 1. Neraca berbentuk rekening T account
- 2. Neraca berbentuk Laporan

Contoh : -01
 Neraca berbentuk T

PT. “HAFSHAH NURJANAH”
 Laporan Neraca
 Per 31 Desember 2023

AKTIVA		PASSIVA	
Aktiva Lancar:		Utang:	
Kas	xxx	Utang lancar:	
Surat berharga	xxx	Utang dagang	xxx
Piutang dagang	xxx	Utang wesel	xxx
Piutang wesel	xxx	Uang PPh	xxx
Cad. Kerugian Piutang	(xxx)	Utang gaji	xxx
Biaya dibyr dimuka	xxx	sewa diterima dimuka	xxx
Perlengkapan	xxx	Total utang lancar	<u>xxx</u>
Persediaan	xxx		
Total Aktiva lancar	<u>xxx</u>	Utang jangka panjang	
		Utang Obligasi	xxx
Investasi jangka panjang	xxx	Utang wesel jangka panjang	xxx
		Total kewajiban jangka panjg	<u>xxx</u>
		Total Kewajiban	xxx
		Modal:	
Aktiva Tetap berwujud:		Modal saham	xxx
Peralatan	xxx	Agio saham	<u>xxx</u>
Bangunan	xxx	Total modal	xxx
Ak. Penyusutan	(xxx)		
Tanah	<u>xxx</u>	Laba ditahan	xxx
Total Aktiva berwujud	xxx		
Aktiva tetap tidak berwujud:		Total Pasiva	<u>xxx</u>
Paten	xxx		
Merek	xxx		
Total akt. tak berwujud	<u>xxx</u>		
Total aktiva	<u>xxx</u>		

Contoh : -02

Neraca bentuk Laporan

PT. "HAFSHAH NURJANAH"				
Laporan Neraca				
Per 31 Desember 2023				
AKTIVA				
Aktiva Lancar:				
Kas		xxx		
Surat berharga		xxx		
Piutang dagang		xxx		
Piutang wesel	xxx			
Cad. Kerugian Piutang		(xxx)		
Biaya dibyr dimuka		xxx		
Perlengkapan	xxx			
Persediaan		xxx		
Total Aktiva lancar			xxx	
Investasi jangka panjang			xxx	
Aktiva Tetap berwujud:				
Peralatan		xxx		
Bangunan		xxx		
Ak. Penyusutan		(xxx)		
Tanah		xxx		
Total aktiva berwujud			xxx	
Aktiva tetap tidak berwujud:				
Paten		xxx		
Merek		xxx		
Total Aktiva tak berwujud			xxx	
Total aktiva				xxx
Pasiva:				
Utang:				
Utang lancar:				
Utang dagang			xxx	
Utang wesel			xxx	
Utang PPh			xxx	
Utang Gaji			xxx	
Sewa diterima dimuka			xxx	
Total utang lancar			xxx	
Utang jangka Panjang:				
Hutang Obligasi			xxx	
Hutang wesel jangka panjang			xxx	
Total hutang jangka panjang			xxx	
Modal:				
Modal setor			xxx	
Agio/ disagio saham	xxx			
Laba ditahan			xxx	
Total modal			xxx	
Total Passiva				xxx

2.3.2 Laporan Laporan Laba Rugi

Deskripsi : Laporan Rugi Laba yang mencerminkan dari kinerja suatu keuangan perusahaan selama satu periode waktu tertentu. Laporan tersebut mencatat dari pendapatan, serta beban, maupun laba rugi bersih yang dihasilkan perusahaan dalam periode tersebut.

Laporan dari laba rugi, juga disebut sebagai laporan rugi laba, menggambarkan dari pendapatan serta biaya suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Laporan rugi laba mempunyai informasi tentang aktivitas bisnis suatu perusahaan, seperti harga pokok dari penjualan, biaya suatu operasional, keuntungan, maupun kerugian. Dengan begitu, kita bisa menilai kapabilitas suatu perusahaan untuk mengumpulkan laba serta sumber pendapatan utamanya. Sumber informasi pada laporan rugi laba tersebut berasal dari suatu transaksi yang menyebabkan perubahan dari ekuitas (kecuali untuk suatu transaksi yang melibatkan pembayaran utang), (Sugiarto et al., 2020).

Tujuan: Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan, yang sangat penting bagi pemegang saham dan investor untuk mengevaluasi hasil operasi dan menentukan kemampuan organisasi untuk menghasilkan keuntungan di masa depan.

Komponen Utama:

1. **Pendapatan:** Meliputi pendapatan usaha dan pendapatan lainnya.
2. **Beban:** Meliputi beban dari usaha, beban dari pokok penjualan (penjualan, administrasi, dan umum), beban penyusutan, dan beban lainnya.
3. **Laba (Rugi) Bersih:** Menghasilkan laba atau hasil sebelum pajak, dari pajak suatu penghasilan, dan laba atau rugi netto pada tahun berjalan.

Beberapa format laporan laba rugi :

1. Bentuk *Single Step* (Satu Tahap)

Penyusunan maupun pengelompokan dari laporan rugi laba dalam bentuk ini tidak mengelompokkan komponen dari pendapatan maupun biaya bank dalam kegiatan suatu operasi yang di luar dari operasi (Sinaga & Doloksaribu Ardin, 2020).

Contoh:

PT. "HAURA ZAHRA WARDAH"

Laporan laba rugi

Untuk tahun yang berakhir 2023

Penjualan		xxx	
Pendapatan sewa		xxx	
Pendapatan deviden		xxx +	
Total pendapatan			xxx
Dikurangi:			
Harga Pokok penjualan	xxx		
Biaya penjualan	xxx		
Biaya administrasi dan umum	xxx		
Biaya bunga	xxx		
Biaya pajak	xxx +		
Total beban			xxx +
Laba atau Rugi			xxx

Contoh: -1

PT. "HAURA ZAHRA WARDAH" menyajikan informasi keuangan untuk tahun 2023, dengan informasi berikut :

Pendapatan dari penjualan	Rp. 50.000.000
Biaya advertising/iklan	Rp. 5.000.000
Biaya administrasi	Rp. 200.000
Pendapatan sewa	Rp. 1.000.000
Gaji pegawai	Rp.10.000.000
Biaya sewa	Rp. 250.000
Biaya pajak	Rp. 5.000.000
Pendapatan deviden	Rp. 500.000
Biaya bunga	Rp. 200.000

Diminta:

Laporan laba rugi harus disusun dalam satu langkah atau single step

Pembahasan :

PT. "HAURA ZAHRA WARDAH"
Laporan laba rugi
Untuk tahun yang berakhir 2023

Pendapatan dari penjualan	50.000.000
Pendapatan dari sewa	1.000.000
Pendapatan dari deviden	500.000
Total dari pendapatan	
51.500.000	
Biaya usaha:	
Biaya advertising/iklan	5.000.000
Biaya administrasi	200.000
Biaya sewa	250.000
Gaji pegawai	10.000.000
Biaya pajak	5.000.000
Biaya bunga	200.000
Total dari biaya	
20.650.000	
Laba dari usaha	30.850.000

2. Bentuk *Multiple step* (Banyak tahap)

Untuk menghitung rugi laba kotor, maupun rugi laba bersih sesudah pajak, sebelum pajak, serta komponen dan elemen diluar, laporan disusun secara berurutan berdasarkan pendapatan dan beban (Sinaga & Doloksaribu Ardin, 2020).

Contoh:

PT. "HAFSHAH NURJANAH"
Laporan laba rugi
Untuk tahun yang berakhir 2023

Penjualan		xxx	
Potongan penjualan		(xxx)	
Retur Penjualan		<u>(xxx)</u>	
Total penjualan bersih			xxx
Harga pokok penjualan (HPP):			
Persediaan awal	xxx		
Pembelian	xxx		
Potongan pembelian	(xxx)		
Retur pembelian	(xxx)		
Biaya angkut pembelian	<u>xxx</u>		
Total pembelian		xxx	
Barang tersedia untuk dijual		xxx	
Persediaan akhir		<u>(xxx)</u>	
Harga pokok penjualan			<u>(xxx)</u>
Laba kotor			xxx
Biaya-biaya (usaha/operasi):			
Biaya penjualan:			
Gaji bagian penjualan		xxx	
Biaya iklan	xxx		
Depresiasi peralatan penjualan	xxx		
Biaya lain-lain penjualan	xxx		
Total biaya bagian penjualan		<u>xxx</u>	
Biaya administrasi dan umum:			
Gaji bagian kantor	xxx		
Biaya perjalanan dinas kantor		xxx	
Biaya administrasi	xxx		
Depresiasi peralatan kantor		xxx	
Biaya lain-lain administrasi		xxx	
Total biaya administrasi dan umum		<u>xxx</u>	
Total biaya usaha/operasi			<u>(xxx)</u>
Laba usaha sebelum pajak			xxx
Biaya pajak pendapatan			<u>(xxx)</u>
Laba bersih usaha			xxx

Contoh :

PT. “HAFSHAH NURJANAH” menyajikan informasi keuangan untuk tahun 2023, dengan informasi berikut :

Persediaan awal	Rp.20.000.000
Pendapatan deviden	Rp.4.000.000
Penjualan kotor	Rp.400.000.000
Biaya Administrasi umum	Rp.2.250.000
Biaya angkut penjualan	Rp.7.500.000
Biaya Angkut pembelian	Rp.5.000.000
Persediaan akhir	Rp.35.000.000
Gaji bag. Penjualan	Rp.17.500.000
Depresiasi perlt kantor	Rp.1.250.000
Retur penjualan	Rp.30.000.000
Beban iklan	Rp.4.500.000
Beban sewa	Rp.10.500.000
Potongan pembelian	Rp.20.000.000
Potongan dari penjualan	Rp.10.000.000
B. perjltnan dinas bag. Penj	Rp.10.000.000
Retur dari pembelian	Rp.10.000.000
Beban asuransi Ktr	Rp.1.750.000
Gaji bag. Kantor	Rp.15.250.000
Beban bunga	Rp.4.500.000
Depresiasi perlt. Bag. Penj	Rp.1.000.000
Beban pajak	Rp.800.000
Pembelian	Rp.250.000.000

Diminta:

Laporan rugi laba harus disusun dalam bentuk bertingkat/Multiple step

Pemecahan :

PT. "HAFSHAH NURJANAH"
Laporan laba rugi
Untuk tahun yang berakhir 2023

Penjualan			400.000.000	
Potongan penjualan			(10.000.000)	
Retur penjualan			(30.000.000)	
Penjualan bersih				360.000.000
HPP:				
Persediaan awal		20.000.000		
Pembelian	250.000.000			
B. angkut pembelian	5.000.000			
Potongan pembelian	(20.000.000)			
Retur pembelian	(10.000.000)			
Total pembelian		225.000.000		
Barang tersedia untuk dijual		245.000.000		
Persediaan akhir		(35.000.000)		
HPP				(210.000.000)
Laba kotor				150.000.000
Biaya biaya usaha:				
Biaya bagian penjualan:				
Biaya angkut penjualan	7.500.000			
Biaya iklan		4.500.000		
Biaya perjalanan dinas bag. Penjl	10.000.000			
Gaji bag. penjualan		17.500.000		
Depreseasi peralatan bag. Penjualan		1.000.000		
Total biaya bag. Penjualan		40.500.000		
Biaya bag. Administrasi:				
Biaya asuransi bag. Kantor	1.750.000			
Beban administrasi dan umum	2.250.000			
Gaji bag. Kantor		15.250.000		
Depresiasi peralatan bag. Kantor	1.250.000			
Total biaya bag. Kantor		20.500.000		
Total biaya usaha			(61.000.000)	
Laba usaha sebelum pajak				89.000.000
Pendapatan dan biaya lain-lain (Luar operasi)				
Pendapatan lain-lain:				
Pendapatan deviden				4.000.000
Beban lain-lain:				
Beban bunga	4.500.000			
Beban sewa	10.500.000			
Total beban lain-lain			(15.000.000)	
Total laba sebelum pajak				78.000.000
Beban pajak				(800.000)
Laba bersih setelah pajak				77.200.000

Laporan laba rugi bisa dibuat pada dua bentuk, satu langkah atau bertingkat, jika terjadi bencana alam atau keadaan eksternal yang tidak diantisipasi. Laporan ini akan dimunculkan laba netto setelah pajak.

Komponen extraordinary adalah jarang sekali terjadi, tidak menyangka, maupun tidak menginginkan, dan memiliki nilai kerugian yang relatif besar.

1. Pendekatan dari ALL INCLUSIVE

Metode ini bisa menunjukkan elemen extraordinary termasuk dari laporan rugi laba, tetapi tidak akan mempengaruhi perubahan modal.

2. Pendekatan dari CURRENT OPERATING PERFORMANCE

Meskipun metode ini tidak menampilkan komponen dari extraordinary, mereka akan menyajikan dalam laporan dari perubahan modal di masa mendatang.

Contoh : -01

Dari contoh diatas :

Ada laba bersih/netto sebelum pos luar biasa sebesar Rp. 77.200.000, yang kemudian laba sebesar Rp. 5.000.000 saat partner asing mengambil asset (Bangunan), dan kerugian sebesar Rp. 50.000.000 karena bencana alam

Diminta:

Lihat laporan dari rugi laba dengan mempertimbangkan All inclusive serta current operating performance.

Pemecahan:

PT. "HAFSHAH NURJANAH"
Laporan laba rugi
Untuk tahun yang berakhir 2023

	All Inclusive	COP
Laba sebelum pajak dan sebelum pos luar biasa	78.000.000	78.000.000
Pos luar biasa:		
Laba pengambilalihan bangunan partner	5.000.000	-
Kerugian akibat bencana alam	(50.000.000)	-
Laba bersih sebelum pajak	33.000.000	78.000.000
Laba Ditahan:		
Laba ditahan awal	10.000.000	10.000.000
Laba bersih	33.000.000	78.000.000
Total	43.000.000	88.000.000
Laba-rugi pos luar biasa:		
Laba pengambilalihan bangunan partner		5.000.000
Kerugian akibat bencana alam		(50.000.000)
Deviden yang dibagikan	(2.000.000)	(2.000.000)
Total laba ditahan akhir	41.000.000	41.000.000

2.3.3 Laporan Arus Kas

Deskripsi: Laporan Arus Kas dikategorikan berlandaskan aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan. Laporan ini menunjukkan suatu aliran dari kas masuk serta keluar pada suatu perusahaan selama dari periode waktu tertentu.

Laporan dari arus kas yang mencerminkan suatu perubahan dari historis dalam suatu kas maupun setara kas yang dikategorikan berdasarkan aktivitas dari operasi, investasi, serta pendanaan selama suatu periode waktu tertentu. Informasi dari arus kas entitas juga berarti sebagai pedoman untuk menilai kualifikasi entitas dalam mendapatkan kas maupun setara kas. Penghasil mendasar pendapatan entitas adalah aktivitas operasi, bukan dari suatu aktivitas investasi atau pendanaan. Investasi ialah perolehan maupun pelepasan dari aset jangka panjang, dan investasi lain yang bukan termasuk dari setara kas. Pendanaan ialah aktivitas dapat

mengubah jumlah maupun komposisi kontribusi dari ekuitas serta pinjaman entitas (Fadjrih Nur Asyik et al., 2021).

Tujuan: Laporan dari Arus Kas bertujuan untuk diberikan informasi mengenai kemampuan organisasi untuk menghasilkan dana setara, serta bagaimana kas tersebut digunakan. Untuk menilai solvabilitas dan likuiditas suatu perusahaan, manajemen, investor, dan kreditur membutuhkan informasi ini.

Manfaat laporan arus kas (Fadjrih Nur Asyik et al., 2021) meliputi :

1. Memberikan informasi yang membolehkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pergantian dalam suatu aset bersih/netto entitas, struktur dari keuangan (solvabilitas atau likuiditas), serta kemampuan untuk mempengaruhi dari jumlah dan waktu arus kas untuk melakukan penyesuaian pada perubahan kondisi atau peluang.
2. Menilai dari kemampuan suatu subnansi untuk menghasilkan suatu kas maupun setara kas serta dimungkinkan pengguna laporan keuangan membuat model yang dapat menilai maupun membandingkan dengan nilai sekarang dan arus kas di masa yang akan datang (kas masa depan).
3. Meningkatkan kemampuan yang dapat membandingkan pelaporan dari kinerja operasi antar entitas.

Komponen Utama:

1. **Arus Kas dari Aktivitas Operasi :** menunjukkan pembayaran kas pada pemasok serta karyawan, maupun pembayaran pajak.

2. **Arus Kas dari Aktivitas Investasi** : Meliputi pembelian serta penjualan dari aset tetap, maupun investasi dari jangka panjang.
3. **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan** : Termasuk penerimaan penjualan saham, maupun pembayaran pembagian dividen, obligasi, dan pembayaran utang.
4. **Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas.**
5. **Kas dan Setara Kas Awal Periode dan Akhir Periode.**

Contoh Soal 01:

METODE LANGSUNG

Data dari perusahaan perdagangan PT HAIFA untuk bulan April 2022 diketahui seperti berikut dalam satuan rupiah :

Kas awal	120.000.000
Pembelian persediaan barang dagang	80.000.000
Pembelian peralatan	12.000.000
Beban operasi perusahaan	20.000.000
Penjualan dari barang dagang sebesar	200.000.000
Piutang penjualan barang dagang kepada pelanggan	18.000.000
Pendapatan bunga	2.000.000
Penjualan mesin sudah tidak dipakai	4.000.000
Penjualan saham pada pihak investor	20.000.000
Pajak penghasilan	6.000.000
Pembayaran deviden	8.000.000
Pembayaran pada hutang bank	40.000.000
Pembayaran beban bunga	4.000.000
Laba bersih	30.000.000

Diminta :

Buat sebuah laporan dari arus kas sebuah perusahaan perdagangan yang disebutkan di atas dengan mempergunakan metode langsung.

Pembahasan :

PT HAIFA
Laporan Arus Kas (Metode Langsung)
Periode 30 April 2023

Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas		
Penerimaan kas dari pelanggan	Rp 200.000.000	
Piutang dagang	Rp 18.000.000	
Pendapatan bunga diterima	Rp 2.000.000	
Total penerimaan kas		Rp 220.000.000
Pengeluaran kas		
Pembelian persediaan barang dagang	Rp 80.000.000	
Pembayaran beban operasi	Rp 20.000.000	
Pembayaran beban bunga	Rp 4.000.000	
Pembayaran beban pajak penghasilan	Rp 6.000.000	
Total pengeluaran kas		(Rp 110.000.000)
Aliran kas bersih dari aktivitas operasi		Rp 110.000.000
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penerimaan kas		
Penjualan mesin	Rp 4.000.000	
Total penerimaan kas		Rp 4.000.000
Pengeluaran kas		
Pembelian peralatan	Rp 12.000.000	
Total pengeluaran kas		(Rp 12.000.000)
Aliran kas bersih untuk aktivitas investasi		(Rp 8.000.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan kas		
Penjualan saham	Rp 20.000.000	
Total penerimaan kas		Rp 20.000.000
Pengeluaran kas		
Pembayaran deviden	Rp 8.000.000	
Pembayaran hutang bank	Rp 40.000.000	
Total pengeluaran kas		(Rp 48.000.000)
Aliran kas bersih dari aktivitas pendanaan		(Rp 28.000.000)
Kenaikan kas		Rp 74.000.000
Saldo kas awal		Rp 120.000.000
Saldo kas akhir		Rp 194.000.000

Contoh Soal 01:

METODE TIDAK LANGSUNG

Laporan keuangan PT HAIFA disajikan adalah berikut ini :

PT HAIFA

Neraca Komparatif

31 Desember 2022 dan 2023

(dalam ribuan rupiah)

ASET	2023	2022	Perubahan dlm Saldo Akun	
			Bertambah/Berkurang	
Aset Lancar				
Kas	220.000	132.000	88.000	Bertambah
Piutang Usaha	80.000	120.000	(40.000)	Berkurang
Persediaan Barang Dagangan	60.000	40.000	20.000	Bertambah
Beban Dibayar Dimuka	20.000	4.000	16.000	Bertambah
Aset Tetap				
Tanah	520.000	80.000	440.000	Bertambah
Gedung	640.000	160.000	480.000	Bertambah
Akm Depresiasi Gedung	(44.000)	(20.000)	24.000	Bertambah
Peralatan	108.000	40.000	68.000	Bertambah
Akm Depresiasi Peralatan	(12.000)	(4.000)	8.000	Bertambah
TOTAL ASET	1.592.000	552.000		
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas Lancar				
Utang Usaha	112.000	48.000	64.000	Bertambah
Utang Pajak Penghasilan	24.000	32.000	(8.000)	Berkurang
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Obligasi	520.000	80.000	440.000	Bertambah
Ekuitas Pemegang Saham				
Saham Biasa	280.000	200.000	80.000	Bertambah
Laba Ditahan	656.000	192.000	464.000	Bertambah
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	1.592.000	552.000		

PT HAIFA

Laporan Laba Rugi

Untuk Tahun Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

Pendapatan		2.028.000
Biaya Pokok penjualan	600.000	
Biaya Operasi (tdk termasuk Dep.)	444.000	
Biaya Depresiasi	36.000	
Rugi dari Penjualan Peralatan	12.000	
Biaya Bunga	168.000	<u>1.260.000</u>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		768.000
Pajak Penghasilan		<u>(188.000)</u>
Laba Bersih		580.000

Diminta :

Laporan dari arus kas PT HAIFA di atas dibuat dengan mempergunakan metode/teknik tidak langsung.

Pembahasan :

PT HAIFA
Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)
Periode 31Desember 2023
(dalam ribuan rupiah)

Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi		
Laba Bersih		
Penerimaan kas dari pelanggan		Rp 580.000
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih yang dihasilkan aktivitas operasi		
Beban depresiasi	Rp 36.000	
Rugi Penjualan Peralatan	Rp 12.000	
Penurunan Piutang Usaha	Rp 40.000	
Kenaikan Persediaan	(Rp 20.000)	
Kenaikan Beban Dibayar Dimuka	(Rp16.000)	
Kenaikan Utang Usaha	Rp 64.000	
Penurunan Utang Pajak Penghasilan	(8.000)	
Total penerimaan kas		Rp 108.000
Aliran kas bersih dari kegiatan operasi		Rp 688.000.000

2.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Deskripsi: Laporan dari Perubahan Ekuitas mencatat bagaimana ekuitas dari pemilik berubah selama periode waktu tertentu, termasuk laba ditahan, tambahan modal disetor, dan komponen ekuitas lainnya.

Laporan perubahan ekuitas, juga disebut sebagai "laporan ekuitas", menunjukkan bagaimana ekuitas berubah selama jangka waktu tertentu, mungkin satu bulan maupun satu tahun. Laporan tersebut berisi saldo dari awal suatu ekuitas, laba dan rugi untuk periode saat ini, emisi saham, pembelian dari saham treasuri, serta saldo akhir dari ekuitas (Sugiarto et al., 2020).

Tujuan: Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai variabilitas yang memengaruhi ekuitas pemilik selama periode pelaporan. Ini penting untuk menilai bagaimana laba dan distribusi dividen mempengaruhi posisi ekuitas perusahaan.

Komponen Utama:

1. **Modal Saham**
2. **Tambahan Modal Disetor**
3. **Saldo Laba:** Termasuk laba ditahan awal tahun, laba bersih tahun berjalan, dan pembagian dividen.
4. **Komponen Ekuitas Lainnya:** Termasuk pendapatan komprehensif lain dan perubahan dari transaksi dengan pemilik.

Laporan perubahan atas ekuitas adalah laporan dari keuangan yang dibuat sama perusahaan yang menunjukkan apakah aset bersihnya meningkat atau menurun selama periode tertentu. Laporan ini dibuat berdasarkan dari prinsip pengukuran tertentu dianut oleh perusahaan (Fadjrih Nur Asyik et al., 2021). Modal dari pemegang saham yang bergerak selama satu periode akuntansi yang terdiri dari :

1. Laba maupun rugi bersih yang bisa diberikan pada para pemegang saham selama periode akuntansi.
2. Menambah maupun mengurangi dari cadangan modalnya.
3. Membayar dividen pada para pemegang saham yang ada.
4. Keuntungan serta kerugian yang dicatat secara langsung dalam suatu ekuitas.
5. Efek perubahan dari kebijakan sistem akuntansi.
6. Efek koreksi dari kesalahan untuk periode yang lalu.

Laporan rugi laba serta perubahan setiap ekuitas dibuat dalam format berikut ini :

PT HAIFA
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
(dalam ribuan rupiah)

Penjualan Bersih	455.000	
Beban Pokok Penjualan	(135.000)	
Laba Bruto		320.000
Beban Usaha		
- Beban Penjualan	(88.000)	
- Beban Administrasi & Umum	(44.900)	132.900
Laba Usaha		187.100
Pendapatan di Luar Usaha:		
- Pendapatan Bunga		11.200
Laba Bersih Sebelum Pajak		175.900
Beban Pajak Penghasilan		(29.000)
Laba Bersih Setelah Pajak		146.900

PT HAIFA
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
(dalam ribuan rupiah)

Ekuitas Awal (1 Januari 2023)	620.000
Laba Bersih Setelah Pajak	146.900
	766.900
Dividen	240.000
Ekuitas Akhir (31 Desember 2023)	526.900

2.3.5 Catatan Atas Laporan Keuangan.

Deskripsi: Catatan dari Laporan Keuangan menjelaskan rinci serta informasi pelengkap yang memerlukan pemahaman yang lebih baik serta laporan keuangan. Catatan ini mencakup

aturan akuntansi penting, penjelasan rinci pos-pos tertentu, dan informasi penting lainnya.

Laporan keuangan ini akan menampilkan semua elemen yang tidak ada pada laporan keuangan sebelumnya ; dengan asumsi, tiap informasi membutuhkan untuk mendukung dari laporan keuangan yang tidak ada dalam laporan keuangan lebih dahulu akan dimuat ke dalam sebuah catatan dari laporan keuangan (Sinaga & Doloksaribu Ardin, 2020).

Contoh:

1. Jatuh tempo pinjaman bunga
2. Besarnya bunga bank setiap tahun
3. Metode dari penyusutan yang dipergunakan
4. Umur dari ekonomis aktiva tetap
5. Kebijakan dari akuntansi lainnya yang digunakan

Catatan atas suatu laporan keuangan, atau CALK, merupakan inti dari suatu laporan keuangan sebab berisi kebijakan, prinsip, serta teknik akuntansi yang digunakan perusahaan sebagai dasar untuk penyusunan dari laporan keuangan. Catatan dari suatu laporan keuangan tersebut berisi informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan akan tetapi tidak bisa disajikan pada laporan keuangan (Sugiarto et al., 2020).

Tujuan: Catatan ini bertujuan untuk menyediakan konteks dan detail tambahan yang tidak dapat disampaikan secara memadai pada laporan keuangan utama. Ini penting untuk membantu pemangku kepentingan memahami asumsi dan standar akuntansi yang diterapkan saat membuat laporan keuangan.

Kas dibatasi dalam penyajiannya disajikan sesuai dengan tujuan penggunaannya, bukan sebagai komponen kas. Pada laporan posisi keuangan, penyajian ditempatkan didalam aset lancar jika dimaksudkan untuk pendayagunaan jangka panjang, maupun aset non lancar jika dimaksudkan untuk pendayagunaan jangka pendek, seperti satu tahun maupun satu rentang waktu operasi. Overdraft juga bisa disajikan menjadi liabilitas jangka pendek daripada kas.

Jika ada perjanjian bahwa overdraft bisa dikompensasi sama saldo rekening yang lain pada bank yang sama, overdraft dapat disajikan sebagai pengurangan saldo kas. Materai dan perangko, biasanya ada di perusahaan serta dianggap sebagai benda bernilai disimpan di kasir, tidak bisa dianggap sebagai kas. Sebaliknya, mereka harus dianggap sebagai perlengkapan kantor (supplies).

DAFTAR PUSTAKA

- Fadjrih Nur Asyik, Wahidahwati, & Kurnia. (2021). *AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1* (1st ed.). KYTA. www.stiesiaedu.com
- Murniati Sitti, Mashud, Vidiyastutik Elok Dwi, Warkula Yohanes Zefnath, Modjaningrat Radina, & Marliana Rina. (2022). *AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1* (Bahri Syaiful, Ed.; 1st ed.). MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sinaga, T., & Doloksaribu Ardin. (2020). *AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH (INTERMEDIATE ACCOUNTING)* (1st ed., Vol. 1). GALASIBOT.
- Sugiarto, D., Acc, M., & Akt. (2020). *Pelaporan Keuangan*.

BAB 3

AKUNTANSI MANAJEMEN

Oleh Rinda Fithriyana

3.1 Pengertian dan Perkembangan Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen adalah bidang yang berkaitan dengan penyediaan informasi yang relevan untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian operasional perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang mendukung efisiensi dan efektivitas operasional.

Akuntansi manajemen adalah proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi keuangan serta non-keuangan yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang mendukung efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan (Mowen et al., 2022).

Seiring perkembangan waktu, akuntansi manajemen telah berevolusi dari sekadar alat pelaporan biaya menjadi sistem yang lebih canggih yang mencakup berbagai aspek manajemen seperti penganggaran, pengendalian, dan perencanaan strategis.

Akuntansi manajemen adalah proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi keuangan serta non-keuangan yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis. Tidak seperti akuntansi keuangan yang fokus pada pelaporan kepada pihak eksternal, akuntansi manajemen dirancang untuk membantu manajemen internal dalam mengendalikan operasi bisnis dan mencapai tujuan strategis.

Perkembangan akuntansi manajemen telah mengalami transformasi signifikan, terutama dengan adanya teknologi dan globalisasi. Pada awalnya, akuntansi manajemen hanya berfokus pada pelaporan internal, tetapi sekarang mencakup peran strategis dalam mendukung keputusan bisnis yang berorientasi masa depan. Sejarah akuntansi manajemen dapat ditelusuri kembali ke masa revolusi industri ketika kebutuhan untuk mengukur biaya produksi dan kontrol biaya menjadi penting. Pada era modern, akuntansi manajemen telah berkembang untuk mendukung strategi bisnis, analisis biaya yang lebih kompleks, serta pengukuran kinerja berbasis data (Drury, 2023).

3.2 Konsep Dasar dalam Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen mencakup beberapa konsep dasar yang penting untuk operasional bisnis, seperti biaya, penganggaran, dan analisis *break-even*.

3.2.1 Biaya dan Perilaku Biaya

Dalam akuntansi manajemen, biaya dapat dikategorikan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Memahami bagaimana perilaku biaya terhadap perubahan volume produksi sangat penting dalam pengambilan keputusan efektif. Biaya ini adalah komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam akuntansi manajemen. Pemahaman tentang perilaku biaya sangat penting untuk merencanakan anggaran dan memproyeksikan laba (Horngren et al., 2022).

Contoh kasus, Perusahaan manufaktur sering kali menggunakan analisis biaya untuk menentukan kapan mereka dapat meningkatkan produksi tanpa meningkatkan biaya secara signifikan. Dengan memahami biaya tetap dan variabel, manajer dapat merencanakan lebih efektif kapan harus menambah kapasitas produksi.

3.2.2 Penganggaran dan Perencanaan Keuangan

Penganggaran adalah proses merencanakan pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan keuangan organisasi. Ini mencakup berbagai jenis anggaran seperti anggaran operasional, anggaran kas, dan anggaran modal, yang semuanya berfungsi untuk memastikan kelangsungan keuangan perusahaan.

3.2.3 Analisis Break-Event dan Titik Impas

Break-even point (BEP) adalah titik di mana pendapatan total sama dengan total biaya. BEP membantu perusahaan menentukan jumlah minimum produk yang harus dijual untuk menutupi semua biaya, baik tetap maupun variabel. BEP sering digunakan dalam tahap awal perencanaan bisnis untuk menilai apakah bisnis layak dijalankan. Analisis ini digunakan untuk menentukan titik impas (*break-even point*), yaitu saat total pendapatan sama dengan total biaya. Ini membantu manajer menentukan volume penjualan minimum untuk mencapai laba (Garrison et al., 2021).

Contoh kasus, Perusahaan XYZ, yang bergerak dalam produksi alat elektronik, menghitung BEP untuk produk terbarunya. Setelah menghitung biaya tetap sebesar \$100.000 dan biaya variabel sebesar \$50 per unit, perusahaan menemukan bahwa mereka perlu menjual minimal 2.000 unit untuk mencapai titik impas.

3.3 Pengembalian Keputusan Manajerial

3.3.1 Informasi Relevan dalam Keputusan

Akuntansi manajemen berfokus pada informasi relevan yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan strategis. Dalam hal ini, hanya informasi yang relevan, yaitu yang memiliki dampak langsung terhadap keputusan yang diambil, yang digunakan. Keputusan manajerial yang efektif harus didasarkan pada informasi yang relevan dan tepat waktu. Informasi yang tidak relevan atau kadaluwarsa dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

3.3.2 Analisis Biaya-Manfaat

Analisis biaya-manfaat adalah proses mengevaluasi keuntungan yang diharapkan dari suatu keputusan dibandingkan dengan biaya yang akan timbul. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menimbang biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu keputusan terhadap manfaat yang diperoleh. Analisis ini biasanya digunakan dalam keputusan investasi atau pembelian peralatan baru. Analisis biaya-manfaat memberikan gambaran apakah suatu investasi dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan biayanya (Mowen et al., 2022).

Proses ini melibatkan perbandingan biaya yang terkait dengan suatu keputusan dengan manfaat yang diharapkan diperoleh. Contohnya, perusahaan dapat menggunakan akuntansi manajemen untuk menentukan apakah akan membeli peralatan baru berdasarkan proyeksi penghematan biaya (Dlamini, 2024; Harnani, 2022).

3.3.3 Penganggaran Modal

Penganggaran modal adalah proses evaluasi dan seleksi investasi jangka panjang. Salah satu teknik populer yang digunakan adalah *Net Present Value* (NPV) yang menghitung nilai arus kas masa depan dalam nilai saat ini. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk memilih investasi dengan potensi pengembalian yang paling menguntungkan. Akuntansi manajemen juga berperan dalam keputusan penganggaran modal, misalnya dengan menggunakan metode *Net Present Value* (NPV) atau *Internal Rate of Return* (IRR) untuk mengevaluasi investasi jangka Panjang (Mowen et al., 2022).

Contoh Kasus: Perusahaan XYZ sedang mempertimbangkan investasi dalam mesin baru yang lebih efisien. Berdasarkan analisis NPV, manajemen menemukan bahwa investasi tersebut akan menghasilkan penghematan biaya produksi sebesar 20% dalam 5 tahun ke depan, meskipun membutuhkan investasi awal yang besar.

Keputusan diambil dengan mempertimbangkan hasil dari analisis penganggaran modal.

3.4 Pengendalian dan Pengukuran Kinerja

Pengendalian manajemen melibatkan penggunaan informasi akuntansi untuk mengukur kinerja organisasi, memastikan bahwa tujuan operasional tercapai, dan membuat koreksi jika diperlukan. Sistem pengendalian ini mencakup penganggaran, evaluasi kinerja, serta penggunaan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators* - KPI).

3.4.1 *Balanced Scorecard*

Balanced Scorecard adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dari perspektif pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi (Liu, 2024). *Balanced scorecard* merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan empat perspektif utama: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. *Balanced scorecard* membantu manajer tidak hanya fokus pada hasil keuangan tetapi juga pada elemen non-keuangan yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang (Norton et al., 2023).

3.4.2 Pusat Biaya dan Pusat Laba

Pengendalian kinerja dapat dilakukan dengan membagi organisasi ke dalam pusat biaya dan pusat laba, di mana masing-masing unit bertanggung jawab atas biaya atau laba yang dihasilkan (Drury, 2023).

3.4.3 *Six Sigma* dan *Lean Management*

Six Sigma adalah metodologi yang bertujuan untuk mengurangi variasi dan kesalahan dalam proses bisnis. *Lean Management*, di sisi lain, fokus pada pengurangan limbah dalam produksi. Kedua pendekatan ini semakin banyak digunakan dalam

manajemen operasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Contoh kasus, Toyota, sebagai pionir penerapan Lean Management, menggunakan prinsip ini untuk mengurangi waktu siklus produksi dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya produksi.

3.5 Akuntansi Biaya dan Sistem Pengendalian Biaya

Sistem pengendalian biaya membantu organisasi dalam menetapkan standar biaya dan mengidentifikasi penyimpangan dari biaya aktual. Akuntansi biaya adalah elemen kunci dalam akuntansi manajemen, yang membantu perusahaan dalam pengendalian biaya dan penetapan harga produk.

3.5.1 Penentuan Harga Pokok Produksi

Penentuan harga pokok produksi adalah proses mengalokasikan biaya produksi langsung dan tidak langsung untuk menghitung biaya total barang yang diproduksi. Sistem ini bisa berbasis pesanan atau proses, tergantung pada jenis industri.

3.5.2 Akuntanasi Biaya Standar dan Penyimpangan

Akuntansi biaya standar melibatkan penetapan standar biaya untuk produksi dan membandingkannya dengan biaya aktual untuk mengidentifikasi penyimpangan yang memerlukan tindakan korektif.

3.5.3 *Activity-Based Costing (ABC)*

Activity-Based Costing adalah metode yang lebih akurat untuk mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang memicu biaya tersebut, bukan hanya volume produksi.

Metode ini adalah metode akuntansi biaya yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang mendasari biaya tersebut, bukan hanya berdasarkan volume produksi. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk memahami lebih baik biaya sebenarnya dari produk atau layanan tertentu (Mowen et al., 2022).

Contoh Kasus: Sebuah perusahaan manufaktur menggunakan sistem ABC untuk mengidentifikasi bahwa sebagian besar biaya overhead berasal dari aktivitas pengaturan mesin. Dengan menggunakan informasi ini, manajemen memutuskan untuk mengurangi frekuensi pengaturan mesin dengan memperpanjang masa produksi produk tertentu, sehingga mengurangi biaya overhead secara signifikan.

3.5.4 Target Costing dan Kaizen Costing

Target costing adalah pendekatan yang digunakan dalam pengembangan produk, di mana harga jual produk ditentukan terlebih dahulu, dan biaya diturunkan untuk memenuhi target tersebut. Sementara itu, kaizen costing berfokus pada perbaikan terus-menerus dalam biaya produk selama siklus hidup produk.

Contoh kasus, Perusahaan manufaktur otomotif menggunakan target costing untuk menekan biaya produksi mobil listrik agar sesuai dengan daya beli pasar. Mereka memulai dengan menetapkan harga jual yang kompetitif dan berusaha menurunkan biaya produksi melalui inovasi desain dan teknik manufaktur.

3.6 Perencanaan Strategis dan Risiko

3.6.1 Peran Akuntansi Manajemen dalam Strategi

Akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam perencanaan strategis dengan menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan jangka panjang.

3.6.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah alat yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi posisi strategis perusahaan dan merancang strategi yang efektif.

3.6.3 Manajemen Risiko dan Keberlanjutan

Manajemen risiko melibatkan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam konteks keberlanjutan, akuntansi manajemen juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari keputusan bisnis, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang tanpa merugikan masyarakat atau lingkungan.

3.7 Teknologi dan Peran Strategis dalam Akuntansi Manajemen

Teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam akuntansi manajemen. Penggunaan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) memungkinkan integrasi data di seluruh bagian perusahaan, sehingga manajemen dapat membuat keputusan berdasarkan data yang lebih komprehensif dan *real-time* (Chapman *et al.*, 2022). Selain itu, big data dan analitik juga memainkan peran penting dalam analisis keuangan dan operasional yang lebih mendalam.

Teknologi telah mengubah cara informasi keuangan dan non-keuangan dihasilkan, dianalisis, dan digunakan oleh manajemen. Dengan perkembangan teknologi digital seperti Big Data, AI, dan Blockchain, akuntansi manajemen kini mampu menyediakan wawasan yang lebih akurat dan real-time (Bose *et al.*, 2023).

Big data memungkinkan analisis dalam skala besar untuk mengidentifikasi tren dan pola yang tidak terlihat sebelumnya. AI, di

sisi lain, memungkinkan otomatisasi pengambilan keputusan dan prediksi berdasarkan data historis. Dengan memanfaatkan teknologi ini, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat.

Contoh kasus, sebuah perusahaan ritel besar menggunakan analisis big data untuk memahami pola pembelian konsumen selama musim liburan. Dengan analisis ini, perusahaan mampu mengoptimalkan persediaan dan meningkatkan penjualan dengan menargetkan produk yang tepat pada waktu yang tepat.

3.8 Studi Kasus

Untuk mengilustrasikan penerapan konsep-konsep akuntansi manajemen, berikut adalah contoh kasus nyata:

Contoh Kasus: Pengambilan Keputusan Investasi di Perusahaan Manufaktur

Latar Belakang: PT Maju Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang berencana memperluas kapasitas produksinya dengan menambah lini produksi baru. Namun, manajemen harus memutuskan apakah investasi ini layak atau tidak dengan menggunakan penganggaran modal.

Langkah-langkah:

- 1. Analisis Biaya-Manfaat:** Tim akuntansi manajemen menghitung proyeksi biaya investasi sebesar Rp10 miliar, termasuk biaya pembelian mesin baru dan biaya pemasangan. Tim juga memperkirakan tambahan pendapatan tahunan sebesar Rp3 miliar dari peningkatan produksi.
- 2. Penggunaan NPV dan IRR:** Berdasarkan analisis NPV, dengan tingkat diskonto 10%, ditemukan bahwa NPV proyek adalah Rp2 miliar, menunjukkan bahwa proyek ini menguntungkan. IRR dihitung sebesar 15%, yang lebih

tinggi dari tingkat diskonto, mengindikasikan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan.

3. **Evaluasi Risiko:** Tim juga mempertimbangkan risiko yang terkait, termasuk ketidakpastian permintaan pasar dan potensi gangguan dalam rantai pasokan. Sebagai tindakan mitigasi, manajemen mempertimbangkan untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan pemasok bahan baku.

Kesimpulan: Berdasarkan analisis yang dilakukan, manajemen memutuskan untuk melanjutkan investasi ini karena hasil analisis menunjukkan potensi keuntungan yang signifikan dan risiko yang dapat dikelola.

3.9 Kesimpulan

Bab ini telah memberikan gambaran komprehensif tentang peran dan fungsi akuntansi manajemen dalam dunia bisnis. Dengan memahami konsep dasar, alat, dan teknik yang tersedia, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan strategis perusahaan. Tantangan ke depan termasuk adaptasi terhadap perubahan teknologi dan integrasi konsep keberlanjutan dalam praktik akuntansi manajemen. Untuk praktik yang lebih efektif, disarankan agar manajer terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam akuntansi manajemen dan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bose, S., Dey, S. K., & Bhattacharjee, S. (2023). Big data, data analytics and artificial intelligence in accounting: An overview. *Handbook of Big Data Research Methods*, 32–51.
- Chapman, C. S., Hopwood, A. G., & Shields, M. D. (2022). *Handbook of management accounting research*. Elsevier. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zoZT1T9N5PcC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Chapman,+C.+S.,+Hopwood,+A.+G.,+%26+Shields,+M.+D.+\(2022\).+Handbook+of+Managemen+t+Accounting+Research.+Elsevier&ots=xYJ1tPNPaz&sig=Qi72T1VZkUZHJkqUha6VBL_liv0](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zoZT1T9N5PcC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Chapman,+C.+S.,+Hopwood,+A.+G.,+%26+Shields,+M.+D.+(2022).+Handbook+of+Managemen+t+Accounting+Research.+Elsevier&ots=xYJ1tPNPaz&sig=Qi72T1VZkUZHJkqUha6VBL_liv0)
- Dlamini, B. (2024). A systematic literature review of management accounting research in small businesses: Trends and implications in the emerging economies. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy* (2687-2293), 6(3), 150–159.
- Drury, C. M. (2023). *Management and cost accounting*. Springer. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=l2gFCAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Drury,+C.+\(2021\).+Management+and+Cost+Accounting.+Cengage+Learning&ots=EvvgCvIEq_&sig=1dlSFscEH-kB9hcxwkPtIO3AcuM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=l2gFCAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Drury,+C.+(2021).+Management+and+Cost+Accounting.+Cengage+Learning&ots=EvvgCvIEq_&sig=1dlSFscEH-kB9hcxwkPtIO3AcuM)
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2021). *Managerial accounting*. McGraw-Hill. <https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/12832>
- Harnani, S. (2022). Examining the Evolution of Management Accounting: A Qualitative Review. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 755–772.
- Horngren, C., Sundem, G., & Stratton, W. (2022). *Introduction to Managerial Accounting*. <http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9834>

- Liu, Z. (2024). Implementation of the Balanced Scorecard in Large Firms: A Systematic Review. *Asian Journal of Accounting and Finance*, 6(2), Article 2.
- Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Guan, L. (2022). Cost management: Accounting and control. *Mason: Thomson South Western Inc.* <https://fondofomentostamarta.utbvirtual.edu.co/52ammewhnpja/02-trinity-mante-2/document-9780324002324-cost-management-accounting-and-control.pdf>
- Norton, E. L., Kaplan, I. C., Siedlecki, S., Hermann, A. J., Alin, S. R., Newton, J., Corbett, K., Ayres, D., Schumacker, E. J., & Bond, N. A. (2023). Seasonal ocean forecasts to improve predictions of Dungeness crab catch rates, co-developed with state and tribal fishery managers. *ICES Journal of Marine Science*, 80(4), 823–835.

BAB 4

PAJAK DAN PERPAJAKAN

Oleh Ali Tofan

4.1 Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama terbesar saat ini dan alat pengendalian ekonomi. Dengan penerapannya, pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara dan mendistribusikan kesejahteraan secara lebih merata.

Indonesia memiliki berbagai jenis pajak yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pajak-pajak ini digunakan untuk mengumpulkan pendapatan negara guna membiayai berbagai program pembangunan. Jenis pajak di Indonesia dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan sifatnya, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Daerah, dan Pajak Internasional.

4.4.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha selama satu tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak mencakup gaji, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, hadiah, dan jenis penghasilan lain yang diatur dalam undang-undang. Pajak Penghasilan di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang.

1. Aturan Awal Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan mulai diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sistem yang diterapkan pada masa itu adalah sistem *worldwide income*, yang berarti setiap wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan dari luar negeri dapat dikecualikan dari pajak di Indonesia apabila wajib pajak telah membayar pajak di negara sumber penghasilan tersebut, berdasarkan prinsip kredit pajak.

Dalam aturan awal ini, tarif PPh berlaku progresif untuk individu, yaitu semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Selain itu, PPh juga dikenakan kepada badan usaha atau perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya di Indonesia.

2. Pembaruan Pajak Penghasilan Tahun 2000-an

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menggantikan UU PPh sebelumnya. Tujuan dari pembaruan ini adalah untuk menyederhanakan sistem pajak, memperluas basis pajak, serta memberikan insentif bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Beberapa poin penting dari UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):** PTKP diperkenalkan untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak individu yang memiliki penghasilan rendah. PTKP adalah batas penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Pembaruan pada UU No. 36 Tahun 2008 memberikan penyesuaian terhadap PTKP berdasarkan jumlah tanggungan wajib pajak, misalnya

untuk wajib pajak yang memiliki keluarga (istri dan anak).

- b. Penurunan Tarif Pajak Badan:** Tarif PPh untuk badan usaha dikurangi menjadi **25%** dari yang sebelumnya lebih tinggi, guna mendorong investasi dan meningkatkan daya saing perusahaan domestik di pasar global.
- c. Fasilitas Pajak untuk UMKM:** UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun diberikan fasilitas berupa tarif PPh final sebesar **0,5%** dari omzet. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

3. Perubahan melalui Undang-Undang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021

Reformasi pajak besar-besaran terjadi pada tahun 2021 dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. UU ini memperkenalkan beberapa perubahan penting pada sistem Pajak Penghasilan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi global, digitalisasi, serta kebutuhan fiskal negara. Beberapa perubahan penting yang diatur dalam UU HPP terkait Pajak Penghasilan adalah:

- a. Penyesuaian Tarif PPh Orang Pribadi:** Tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi mengalami penyesuaian dengan adanya tambahan tarif pajak baru sebesar **35%** bagi penghasilan tahunan di atas Rp5 miliar. Tarif ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih progresif dan adil, di mana mereka yang berpenghasilan lebih besar dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

- b. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK)** sebagai NPWP: Salah satu inovasi besar dalam UU HPP adalah penggunaan **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** sebagai **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** untuk individu. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan menggunakan NIK, individu secara otomatis terdaftar sebagai wajib pajak tanpa perlu mendaftar terpisah untuk mendapatkan NPWP.
- c. Pengenaan PPh atas Penghasilan Digital:** UU HPP juga memperkenalkan pengenaan PPh atas penghasilan dari transaksi digital lintas batas. Hal ini sangat relevan mengingat banyaknya platform digital asing yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Wajib pajak asing yang menyediakan layanan digital di Indonesia diwajibkan untuk memungut PPh dari pengguna di Indonesia.
- d. Kredit Pajak Luar Negeri:** Untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diterima wajib pajak dari luar negeri, UU HPP memperkuat aturan mengenai kredit pajak luar negeri. Kredit pajak diberikan sebesar pajak yang telah dibayar di negara lain, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam **Pasal 24 UU PPh**.

4. Pajak Penghasilan bagi Ekspatriat dan Tenaga Ahli Asing

Salah satu ketentuan penting dalam UU HPP adalah pengaturan terkait pajak bagi ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Ekspatriat yang memiliki keahlian khusus dan

bekerja di Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia selama empat tahun pertama masa tinggalnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak tenaga ahli asing untuk bekerja di Indonesia, khususnya dalam sektor-sektor strategis yang membutuhkan keahlian spesifik.

5. Perkembangan Pajak Penghasilan dalam Era Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital membawa tantangan baru dalam pengenaan Pajak Penghasilan. Dengan semakin banyaknya transaksi lintas negara melalui platform digital, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan baru yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan digital yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Ini termasuk pengenaan PPh atas layanan digital asing seperti iklan, e-commerce, dan penyedia

4.4.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, baik yang dihasilkan di dalam negeri maupun diimpor. PPN menjadi salah satu komponen pajak yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia, dan peraturannya telah mengalami berbagai perubahan sejak pertama kali diperkenalkan.

1. Aturan PPN Lama

Pengenaan PPN di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam undang-undang ini, PPN dikenakan pada setiap transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan

jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Tarif awal PPN ditetapkan sebesar 10%.

PPN juga diberlakukan pada barang impor, di mana pajak ini harus dibayarkan ketika barang memasuki wilayah Indonesia. Sistem PPN menggunakan mekanisme kredit pajak yang berarti pajak masukan (pajak yang dibayarkan oleh PKP saat membeli barang atau jasa) dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran (pajak yang dipungut saat menjual barang atau jasa).

2. Pembaruan PPN Tahun 2000-an

Perkembangan ekonomi dan globalisasi mendorong Indonesia untuk memperbarui peraturan PPN dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang merevisi UU PPN sebelumnya. Salah satu perubahan penting dalam UU ini adalah pengenalan skema fasilitas pembebasan PPN untuk barang dan jasa tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat umum, seperti barang kebutuhan pokok, pendidikan, dan jasa kesehatan.

Selain itu, dalam era ini mulai diperkenalkan juga konsep Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang lebih rinci, yang memungkinkan perusahaan atau pengusaha untuk mengurangi beban PPN yang mereka bayarkan pada saat pembelian barang atau jasa dari pemasok.

3. Reformasi PPN melalui UU Nomor 42 Tahun 2009

Perubahan besar selanjutnya datang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Reformasi ini bertujuan untuk menyempurnakan administrasi PPN dan mengurangi kebocoran pajak. Beberapa ketentuan penting dalam UU ini meliputi:

- a. **Ekspor Barang dan Jasa Tertentu:** PPN dikenakan dengan tarif **0%** untuk ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud maupun tidak berwujud, serta jasa kena pajak (JKP) tertentu.
- b. **Penyederhanaan Administrasi:** Penyederhanaan administrasi perpajakan melalui penggunaan faktur pajak elektronik untuk mengurangi praktik penipuan pajak.

UU ini juga memberikan perhatian khusus pada penanganan restitusi PPN, di mana pengusaha dapat mengajukan pengembalian pajak jika pajak masukan yang mereka bayar lebih besar dari pajak keluaran yang mereka pungut.

4. **Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 2021**

Reformasi PPN terbaru diatur melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan secara menyeluruh dan menyesuaikan dengan standar internasional. Beberapa poin penting dalam UU HPP terkait PPN adalah:

- a. **Kenaikan Tarif PPN:** Mulai April 2022, tarif PPN naik dari **10% menjadi 11%**, dan akan meningkat lagi menjadi **12%** paling lambat pada tahun 2025. Kenaikan tarif ini dilakukan untuk menambah penerimaan negara dalam mendukung pembangunan.
- b. **Pembebasan PPN untuk Barang/Jasa Strategis:** Beberapa barang dan jasa strategis seperti bahan pokok, pelayanan kesehatan, dan pendidikan tetap dibebaskan dari PPN.
- c. **Perluasan Basis PPN:** Pengenaan PPN tidak hanya terbatas pada barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri, tetapi juga mencakup transaksi digital lintas negara. Ini

sejalan dengan perkembangan ekonomi digital di mana banyak layanan digital asing, seperti streaming atau e-commerce, dikenakan PPN.

4.4.3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang-barang yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Pajak ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PPnBM dikenakan selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tujuan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah yang dianggap tidak sesuai dengan keadilan sosial serta untuk menjaga stabilitas ekonomi.

1. Konsep Dasar Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PPnBM dikenakan pada barang-barang yang diproduksi atau diimpor yang memiliki sifat-sifat berikut:

- a. Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok.
- b. Barang tersebut umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- c. Barang tersebut sering kali menunjukkan status atau prestise tertentu bagi pemiliknya.
- d. Barang tersebut dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi apabila dikonsumsi secara luas.

Dengan demikian, PPnBM tidak dikenakan pada semua jenis barang, tetapi hanya barang-barang yang memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor barang atau penyerahan barang dari produsen kepada distributor atau konsumen akhir.

2. Aturan Awal PPnBM

Aturan awal mengenai PPnBM diatur **dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983** bersamaan dengan pengaturan PPN. PPnBM dikenakan atas barang-barang yang termasuk dalam kategori mewah, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, barang elektronik kelas atas, dan furnitur mewah. Tarif PPnBM pada saat itu bervariasi tergantung pada jenis barangnya, dengan kisaran tarif antara 10% hingga 75%.

PPnBM pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. Mengendalikan konsumsi barang-barang mewah di kalangan masyarakat.
- b. Menambah penerimaan negara melalui pengenaan pajak tambahan atas barang-barang yang tidak dianggap sebagai kebutuhan pokok.
- c. Menjaga keseimbangan antara konsumsi barang mewah dan distribusi pendapatan di masyarakat.

3. Pembaruan PPnBM melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Pada tahun 2009, pemerintah memperbarui pengaturan mengenai PPnBM melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. UU ini menetapkan pembagian lebih jelas mengenai barang-barang yang dikenakan PPnBM, serta menetapkan bahwa PPnBM dapat dikenakan dengan tarif maksimal 200% tergantung pada jenis barangnya. UU No. 42 Tahun 2009 juga menyesuaikan ketentuan mengenai mekanisme penghitungan dan pelaporan PPnBM, agar lebih sederhana dan transparan. Beberapa kategori barang yang dikenakan PPnBM dalam UU No. 42 Tahun 2009 meliputi:

- a. **Kendaraan Bermotor Mewah:** Mobil sport, mobil mewah, dan kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin besar.

- b. Perhiasan:** Barang-barang perhiasan seperti emas, berlian, dan permata.
- c. Produk Elektronik Premium:** Barang-barang elektronik dengan fitur dan harga tinggi, seperti televisi berlayar besar, sound system mewah, dan produk teknologi canggih.

4. Perubahan Terkini dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, terdapat beberapa pembaruan penting terkait PPnBM. Pembaruan ini menyesuaikan tarif dan kategori barang yang dikenakan PPnBM untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan tren konsumsi masyarakat. Beberapa poin penting dari perubahan terbaru ini adalah:

- a. Kendaraan Ramah Lingkungan:** Dalam rangka mendukung kebijakan pengurangan emisi karbon dan peralihan ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, pemerintah mengeluarkan aturan bahwa kendaraan bermotor listrik yang tidak mengeluarkan emisi, seperti mobil listrik dan mobil hybrid, mendapatkan fasilitas bebas PPnBM atau dikenakan PPnBM dengan tarif yang sangat rendah.
- b. Penyesuaian Tarif untuk Kendaraan Mewah:** Kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin di atas 3.000 cc dikenakan tarif PPnBM yang lebih tinggi, dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi kendaraan yang boros energi dan emisi tinggi. Tarif PPnBM untuk kendaraan ini mencapai 40% hingga 75% tergantung jenis dan kapasitas mesinnya.
- c. Barang Mewah dalam Kategori Properti:** Properti mewah seperti rumah mewah, apartemen, dan kondominium yang memiliki nilai jual sangat tinggi juga dikenakan PPnBM dengan tarif yang bervariasi. Properti

dengan harga jual di atas Rp30 miliar dikenakan PPnBM dengan tarif 20% hingga 40%.

5. Fasilitas Bebas PPnBM

Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi dan produksi barang-barang tertentu, beberapa barang yang diproduksi atau diimpor untuk keperluan ekspor diberikan fasilitas bebas PPnBM. Barang-barang yang dimaksud termasuk barang modal yang digunakan oleh industri untuk proses produksi serta barang-barang tertentu yang diekspor keluar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri dan mendorong ekspor produk lokal.

6. Dampak PPnBM terhadap Perekonomian

PPnBM memberikan dampak yang signifikan terhadap beberapa sektor ekonomi, terutama di sektor otomotif dan properti. Pada satu sisi, pajak ini membantu menambah penerimaan negara dan mengendalikan konsumsi barang-barang mewah yang cenderung boros sumber daya. Namun, di sisi lain, PPnBM yang terlalu tinggi pada barang-barang seperti kendaraan bermotor dan properti mewah dapat mempengaruhi penjualan dan investasi di sektor-sektor tersebut.

Pemerintah secara berkala meninjau dan menyesuaikan tarif PPnBM untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan sektor-sektor strategis, sambil tetap menjalankan fungsi redistribusi dan kontrol atas konsumsi barang mewah.

4.4.4 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan di daerah masing-masing. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah bertujuan untuk memberikan otonomi fiskal kepada pemerintah daerah guna mendukung pembangunan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1. Pajak Provinsi

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi meliputi:

- a. **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):** Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Dasar hukum: **Pasal 2 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.**

- b. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):** Pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari satu pihak ke pihak lain.

Dasar hukum: **Pasal 12 UU No. 28 Tahun 2009.**

- c. **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB):** Pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Dasar hukum: **Pasal 17 UU No. 28 Tahun 2009.**

- d. **Pajak Air Permukaan:** Pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Dasar hukum: **Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2009.**

- e. **Pajak Rokok:** Pajak yang dikenakan atas konsumsi rokok, yang ditarik dari produsen atau importir rokok.

Dasar hukum: **Pasal 26 UU No. 28 Tahun 2009.**

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi:

- a. **Pajak Hotel:** Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel.

Dasar hukum: **Pasal 32 UU No. 28 Tahun 2009.**

- b. **Pajak Restoran:** Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran.

Dasar hukum: **Pasal 36 UU No. 28 Tahun 2009.**

- c. **Pajak Hiburan:** Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, seperti bioskop, pertunjukan, dan konser.

Dasar hukum: **Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2009.**

- d. **Pajak Reklame:** Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, baik media cetak, elektronik, maupun bentuk reklame lainnya.

Dasar hukum: **Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2009.**

- e. **Pajak Penerangan Jalan:** Pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Dasar hukum: **Pasal 45 UU No. 28 Tahun 2009.**

- f. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:** Pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Dasar hukum: **Pasal 50 UU No. 28 Tahun 2009.**

- g. **Pajak Parkir:** Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang dikelola oleh pihak swasta.

Dasar hukum: **Pasal 56 UU No. 28 Tahun 2009.**

- h. **Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2):** Pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan.

Dasar hukum: **Pasal 77 UU No. 28 Tahun 2009.**

- i. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB):** Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dasar hukum: **Pasal 85 UU No. 28 Tahun 2009.**

Pembaruan Aturan Pajak Daerah

Perubahan terkini dalam pengaturan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU ini memperluas wewenang pemerintah daerah dalam memungut pajak dan mengatur penggunaan pajak daerah untuk mendukung pembangunan dan investasi di daerah.

Poin-poin utama dari UU HKPD antara lain:

1. **Penggabungan Pajak Daerah:** Beberapa jenis pajak yang sebelumnya terpisah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), digabungkan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan.
2. **Peningkatan Pendapatan Daerah:** Pajak daerah diprioritaskan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
3. **Inovasi dan Insentif Pajak:** Pemerintah daerah diberikan fleksibilitas lebih dalam memberikan insentif pajak untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian lokal.

4.4.5 Pajak Internasional

Pajak internasional berkaitan dengan pengenaan pajak atas transaksi lintas batas negara, termasuk penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha dari sumber luar negeri. Aturan perpajakan internasional dirancang untuk menghindari pengenaan pajak ganda (*double taxation*) serta untuk mencegah penghindaran

pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak yang beroperasi di lebih dari satu negara.

Aturan Lama Pengaturan pajak internasional di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Aturan ini mengadopsi prinsip *worldwide income*, yang berarti wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mencegah pajak ganda, Indonesia menerapkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Double Tax Avoidance Agreement (DTAA) dengan berbagai negara mitra dagang.

Perjanjian ini memungkinkan wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap kewajiban pajak dalam negeri. Pada tahun 1995, Indonesia mulai mengintensifkan pembentukan P3B dengan negara-negara mitra, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan aturan bagi wajib pajak yang terlibat dalam transaksi internasional, termasuk ketentuan tentang tarif pajak yang lebih rendah untuk dividen, bunga, dan royalti.

Aturan Terbaru Reformasi besar dalam pajak internasional dimulai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menyempurnakan beberapa ketentuan penting, termasuk tarif pajak bagi pendapatan yang bersumber dari luar negeri. Salah satu pembaruan penting adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini menyelaraskan ketentuan perpajakan internasional Indonesia dengan standar internasional, seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang diinisiasi oleh OECD/G20.

Perubahan yang diatur dalam UU HPP ini meliputi:

- 1. Penghindaran Pajak Berganda:** Wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan dari luar negeri diberikan fasilitas

kredit pajak luar negeri sesuai dengan Pasal 24 UU PPh. Kredit pajak luar negeri diberikan untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama.

2. **Pengenaan Pajak atas Ekspatriat:** Ekspatriat yang bekerja di Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia selama empat tahun pertama sejak mereka tinggal di Indonesia, yang merupakan bagian dari upaya untuk menarik tenaga kerja asing dengan keahlian khusus.
3. **Pajak atas Transaksi Digital Lintas Batas:** Mulai 2020, Indonesia memperkenalkan pajak atas layanan digital internasional yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi asing. Ini termasuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk platform digital asing seperti layanan streaming, e-commerce, dan penyedia iklan digital. Langkah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020.

Selain itu, Indonesia turut mendukung inisiatif global dalam pengenaan Pajak Minimum Global sebesar 15% yang merupakan bagian dari upaya mengatasi praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia. 1983. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Republik Indonesia. 2021. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Republik Indonesia. 2020. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

BAB 5

AUDIT DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Oleh Wedia Hastuti

5.1 Apa Itu Audit Internal?

Salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh sebuah organisasi adalah audit internal, yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Audit ini dilakukan oleh tim audit organisasi yang independen dan objektif untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal organisasi, mengidentifikasi risiko, dan memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan menawarkan saran rekomendasi tentang manajemen kontrol, pengukuran kinerja, dan pengelolaan risiko, tujuannya adalah untuk membantu perusahaan agar lebih mudah mencapai tujuan bisnisnya.(Bagaskara, 2022).

Dalam proses audit atau pemeriksaan internal, terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu kontrol internal dipantau, pengelolaan risiko dilakukan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan dipantau.

Tim audit organisasi harus memastikan proses audit berjalan adil dengan mematuhi etika dan standar profesi audit atau tinjauan internal. Mereka juga harus mengumpulkan dan menganalisis data, menguji kontrol internal, menemukan kesalahan, menyusun laporan, dan memberikan saran untuk tindakan lanjut.

5.2 Lima Konsep Audit Internal

Sejak tahun 1941, saat terbentuknya Institute of Internal Auditors (IIA), fungsi audit internal telah mengalami perubahan yang cukup pesat. Perubahan yang signifikan terjadi pada tingkat praktis, tetapi tidak pada tingkat konseptual. Gil Courtemanche (1991) membagi konsep audit internal menjadi tiga fase: tradisional, modern, dan neo-modern. Konsep audit internal kontemporer, yang didirikan pada tahun 1986, berpendapat bahwa audit internal merupakan fungsi utama dalam organisasi yang melibatkan pihak-pihak manajemen puncak, auditor eksternal, dan divisi pengendalian intern. Konsep tradisional audit internal terutama berfokus pada fungsi pengendalian intern pada bagian atau divisi pengendalian intern, sementara konsep modern menunjukkan penyediaan fungsi pengendalian intern dan layanan konsultasi kepada pihak manajemen.

Lawrence B. Sawyer, dalam artikelnya yang terkenal "An internal Audit philosophy" (1995), berbicara tentang hal-hal berikut untuk memperkuat dasar pemahaman kita tentang audit internal. Pada tulisan ini, lima filosofi audit internal diuraikan, masing-masing sangat relevan dengan keadaan saat ini (Syarif, 2016).

1. Internal Auditor Harus Bisa Memberikan Nilai Tambah

Setiap tindakan yang dilakukan oleh auditor internal kepada pihak yang berkepentingan harus berdampak positif pada pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan kata lain, fungsi audit internal harus dapat memberikan nilai tambah kepada semua pihak yang berkepentingan dengan tugas-tugas auditor internal. "To leave every place a little better than I found it," kata Sawyer, dengan kata-kata yang sederhana tetapi memiliki makna yang mendalam. Auditor internal harus dapat "mewarnai" organisasi pengguna jasanya, tidak peduli seberapa kecil perbaikan yang dapat dilakukannya. Ini karena tugasnya harus menjadi lebih baik dari saat sebelum ia datang.

2. Fungsi Audit Internal Harus Didasarkan pada Mandat/Kewenangan yang Kuat dan Jelas.

Sangatlah tepat kiranya pernyataan Sawyer, "You can't stomp your foot when you are on your knees." Secara sadar, jika kita hanya bertumpu pada lutut kita, bukan pada telapak kaki kita dan di atas lantai yang kuat, kita akan sangat sulit untuk menghentakkan kaki kita. Tidak diragukan lagi, fungsi audit internal akan berjalan dengan baik jika memiliki landasan hukum yang jelas, mandat, dan dukungan dari pimpinan tertinggi perusahaan. Sebaliknya, meskipun organisasi audit internal memiliki sumber daya manusia, fasilitas, dana, serta prosedur kerja yang luar biasa, hampir pasti tidak akan mampu memenuhi harapan stakeholder menjadi lebih baik daripada situasi sebelumnya jika tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, mandat, dan dukungan dari pimpinan tertinggi perusahaan.

3. Pahami dengan Baik Tujuan *Stakeholders*.

Jika auditor internal benar-benar memahami keinginan stakeholder, tugasnya akan diselesaikan dengan efisien dan efektif serta dapat memberikan nilai tambah kepada pihak stakeholder. Setiap pimpinan puncak organisasi ingin tujuan organisasinya dicapai dengan cara terbaik. Untuk memungkinkan stakeholder "mengawal" pencapaian tujuan organisasi, fungsi audit internal harus digunakan dengan cermat. Memungkinkan komunikasi yang efektif antara pemberi mandat (manajemen puncak) dan penerima mandat (auditor internal) adalah salah satu syarat penting untuk pelaksanaan tugas ini. Ini dilakukan untuk mencegah kekacauan saat menetapkan strategi dan menjalankan operasi di organisasi auditor internal. Selain itu, komunikasi yang konsisten dan terorganisir diharapkan dapat memberikan jaminan kepada manajemen puncak bahwa organisasi sudah

berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuannya atau bahwa perubahan yang signifikan dan segera diperlukan untuk bagian internal perusahaan.

4. Fungsi Audit Internal Harus Memperoleh dan Menyajikan Informasi Secara Akurat.

Salah satu tugas utama auditor internal adalah mengumpulkan fakta. Setelah mengumpulkan fakta dan informasi, auditor internal membuat kesimpulan dan saran untuk perbaikan. Tentu saja, kualitas informasi yang akan dihasilkan oleh pihak auditor internal sangat bergantung pada seberapa berkualitas informasi yang diterima dari pihak pemangku kepentingan perusahaan dalam hal ini stakeholders. Untuk itu, auditor internal harus bersikap hati-hati, teliti, dan profesional saat mengumpulkan data. Mereka harus bertindak seperti pemberi keterangan ahli di sidang pengadilan, menjelaskan suatu perkara untuk meyakinkan hakim untuk membuat keputusan.

5. Fungsi Audit Internal Harus Mencermati Budaya dan Situasi Politik yang Sedang Berlangsung.

Politik adalah tentang memperoleh, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan dengan baik; budaya adalah sistem nilai yang dipegang oleh mereka yang memegang kekuasaan; dan peraturan adalah tentang membuat orang ingin atau tidak ingin melakukan sesuatu. Tiga hal yang sangat penting untuk fungsi audit internal adalah kompetensi, integritas, dan kesetiaan. Untuk mendapatkan pengakuan profesionalisme dan dihormati oleh rekan sejawat dan atasannya, setiap auditor internal harus memiliki dan melaksanakan ketiga elemen tersebut. Namun, ketiga kemampuan penting auditor internal akan sia-sia jika mereka tidak peduli atau tidak memahami budaya dan situasi politik yang berkembang dalam organisasi para stakeholder-nya. Secara singkat, auditor internal dapat

disebut sebagai "ahli" dan "bijak" jika mereka bekerja secara cermat sesuai dengan standar profesional dan juga memiliki kemampuan untuk memahami budaya dan situasi politis yang sedang berlangsung.

5.3 Pentingnya Audit Internal Bagi Perusahaan

Proses audit internal sangat penting bagi sebuah perusahaan. Proses audit adalah bukti bahwa dokumen saat ini benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan. Selain itu, proses ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa seluruh aset perusahaan berada di tempat yang aman dan aman dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Namun, apa manfaat audit internal bagi bisnis? Berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari audit internal. (Binus, 2023):

1. Objektivitas

Auditor atau pelaksana audit internal harus memberikan pendapat yang tidak bias mengenai aspek yang sedang diamati karena itu mereka harus berasal dari luar departemen yang bersangkutan dan tidak memiliki tanggung jawab atau kepentingan dengan pekerjaan untuk departemen tersebut yang sedang diaudit oleh mereka. Ini akan memungkinkan pelaksana audit internal untuk bertindak secara independen dan tidak bias selama proses audit untuk kepentingan perusahaan.

2. Menunjukkan diri sebagai perusahaan yang taat hukum.

Setiap perusahaan harus melakukan proses audit internal. Proses ini akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek bisnis telah sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, audit internal membantu perusahaan mempersiapkan diri untuk audit eksternal. Perusahaan yang telah menyelesaikan proses audit internal dan eksternal akan

memiliki nilai tambah kepercayaan di mata pelanggan dan konsumen.

3. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Perusahaan dapat melakukan audit internal untuk mengetahui apakah proses pengendalian internal yang telah dibuat oleh manajemen berfungsi dengan baik atau tidak. Jika dari hasil audit internal fungsi pengendaliannya buruk, maka perusahaan dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Menambah nilai tambah bagi perusahaan.

Audit internal dapat menambah nilai bagi perusahaan. Auditor internal dapat menawarkan saran dan nasihat tentang cara memperbaiki proses bisnis perusahaan, yang dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Dengan mempertimbangkan keuntungan di atas, dapat disimpulkan bahwa auditor internal memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memperhatikan dan melaksanakan proses audit internal secara teratur dan konsisten untuk memastikan bahwa semua aspek operasi perusahaan berjalan dengan baik dan efisien.

5.4 Kebutuhan Manajemen akan Pengendalian Internal

Manajemen melakukan dua hal: menetapkan tujuan dan mengatur pelaksanaannya untuk mencapainya. Dengan situasi yang semakin berkembang mau tidak mau para manajer dituntut untuk menjadi manajer profesional agar terus *upto date*. Kompleksitas bidang usaha modern telah meningkatkan beban kerja manajer profesional. Tugas manajer sangat rumit dan sulit. Sehingga agar tujuan yang menjadi tanggung jawab para manajer perusahaan dapat dicapai secara efisien dan efektif, manajer harus memiliki

kemampuan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang baik.

5.4.1 Apa itu Pengendalian Internal?

Departemen keuangan perusahaan menggunakan metode akuntansi dan audit yang dikenal sebagai pengendalian internal untuk memastikan pelaporan keuangan yang akurat dan kepatuhan terhadap peraturan. Pengendalian internal membantu perusahaan mematuhi hukum dan peraturan serta mencegah penipuan atau kecurangan. Dengan memastikan bahwa kebijakan dipatuhi, anggaran dipatuhi, kekurangan modal diidentifikasi, dan laporan yang akurat dibuat untuk kepemimpinan, mereka juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional.

5.4.2 Memahami Pengendalian Internal

Sejak skandal akuntansi awal tahun 2000an, semua perusahaan di Amerika Serikat berkonsentrasi pada pengendalian internal. *Sarbanes-Oxley Act* tahun 2002 diberlakukan untuk melindungi investor dari aktivitas akuntansi yang curang dan meningkatkan akurasi dan keandalan pengungkapan perusahaan setelah perusahaan tersebut melakukan pelanggaran.

Ini sangat memengaruhi sikap profesional manajemen perusahaan. Menurut undang-undang, manajer bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan rekaman audit. Jika dinyatakan bersalah atas kegagalan untuk membangun dan mengelola pengendalian internal dengan cara yang tepat, manajer akan menghadapi hukuman pidana yang berat.

Auditor eksternal menilai laporan keuangan berdasarkan audit atas prosedur dan catatan yang digunakan untuk membuat laporan tersebut. Sebagai bagian dari audit, auditor eksternal

akan menilai efektivitas pengendalian internal dan proses pelaksanaan akuntansi perusahaan.

5.4.3 Pentingnya Pengendalian Internal

Audit internal memeriksa pengendalian internal perusahaan, yang mencakup proses akuntansi dan manajemen. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, serta pelaporan keuangan dan pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu, apakah sudah dapat dijamin oleh pengendalian internal perusahaan ataukah belum hal inilah yang akan diperiksa oleh audit internal. Mereka meningkatkan efisiensi operasional dengan menemukan masalah dan memperbaikinya sebelum audit eksternal ditemukan.

Sejak Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 membuat manajer bertanggung jawab secara hukum atas keakuratan laporan keuangannya, audit internal sangat penting untuk operasi dan tata kelola perusahaan.

Tidak ada dua sistem pengendalian internal yang sama, tetapi banyak filosofi dasar tentang integritas keuangan dan praktik akuntansi telah berkembang menjadi praktik manajemen umum. Meskipun mahal, pengendalian internal dapat mencegah penipuan dan menyederhanakan serta meningkatkan efisiensi operasional.

5.4.4 Komponen Pengendalian Internal

Komponen-komponen berikut harus termasuk dalam sistem pengendalian internal organisasi: (Kenton, 2024):

- 1. Lingkungan pengendalian:** Dalam lingkungan pengendalian, semua karyawan harus berperilaku jujur dan berkomitmen untuk menemukan dan menghilangkan ketidakwajaran, termasuk penipuan. Manajemen dan dewan direksi harus mampu membangun lingkungan ini dan memberi contoh. Untuk memenuhi tujuan pengendalian

internal, manajemen harus menerapkan sistem internal dan personel.

2. **Penilaian risiko:** Perusahaan harus secara teratur menilai dan menemukan risiko, apakah itu ada atau tidak. Berdasarkan hasil penilaian, fokus dan tingkat pengendalian tambahan dapat diterapkan untuk memastikan apakah pengendalian risiko atau pengawasan risiko di bidang terkait perlu ditingkatkan atau tidak.
3. **Memantau:** Perusahaan harus memantau sistem pengendalian internalnya demi keberlangsungan bisnisnya. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pembaruan sistem, merekrut lebih banyak karyawan, atau memberikan pelatihan karyawan yang diperlukan agar sistem tetap beroperasi sesuai kebutuhan.
4. **Informasi/Komunikasi:** Informasi yang kuat dan komunikasi yang konsisten sangat penting bagi kedua belah pihak. Pertama, keberhasilan pengendalian internal dapat ditentukan oleh kejelasan tujuan dan peran. Kedua, membantu karyawan memahami dan berkomitmen terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan dapat membantu mereka melakukan pekerjaan mereka dengan paling efektif.
5. **Aktivitas pengendalian:** Ini mencakup prosedur, kebijakan, dan tindakan lain yang memastikan integritas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan, serta kegiatan pencegahan dan deteksi.
6. **Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan:** Bisnis harus mematuhi semua hukum, peraturan, dan standar yang relevan. Ini termasuk mengikuti perubahan peraturan keuangan dan memastikan kepatuhan.
7. **Pemisahan tugas:** Mengurangi kemungkinan kesalahan atau tindakan yang tidak pantas dengan membagi tanggung

jawab di antara individu yang berbeda. Dengan adanya pemisahan peran otorisasi, penyimpanan, dan pencatatan maka diharapkan akan dapat menghindarkan dari kesalahan, penipuan, dan kecurangan.

- 8. Kontrol fisik:** Untuk melindungi asetnya, seperti uang tunai, inventaris, dan peralatan, perusahaan harus menggunakan fasilitas penyimpanan yang aman, kontrol akses, dan sistem pengawasan.

5.4.3 Keterbatasan Pengendalian Internal

Hanya pengendalian internal yang dapat memberikan keyakinan yang kuat bahwa informasi keuangan perusahaan benar, terlepas dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi.

Ada kemungkinan bahwa penilaian manusia akan membatasi efektivitas pengendalian internal. Misalnya, suatu perusahaan dapat memberikan tanggungjawab tertinggi kepada stafnya untuk mengesampingkan pengendalian internal demi meningkatkan efisiensi operasional.

Selain itu, kolusi dapat mencegah pengendalian internal. Karyawan yang biasanya diawasi oleh pengendalian internal bekerja sama secara rahasia untuk menyembunyikan pelanggaran atau penipuan lainnya.

5.5 Jenis Pengendalian Internal

Jenis pengendalian internal yang digunakan oleh suatu organisasi tergantung pada jenis organisasi dan bagaimana operasinya dijalankan. Namun, penting bagi proses audit perusahaan untuk mencakup semua prosedur dan teknik yang diperlukan untuk membangun metode pengendalian internal yang efektif dan efisien.

Berikut ini adalah berbagai jenis kontrol internal perusahaan. (Priharto, 2023):

1. Pengendalian preventif

Jenis pengendalian internal ini memiliki tujuan yang sama dengan namanya. Pengendalian preventif digunakan untuk mencegah kesalahan dan anomali terjadi dan menyebabkan kerusakan.

2. Pengendalian detektif

Pengendalian internal jenis ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tujuan pengendalian ini adalah untuk mengetahui setiap anomali dan kesalahan yang terjadi dalam organisasi.

3. Pengendalian korektif

Seperti namanya, pengendalian korektif dilakukan untuk menemukan kesalahan dan anomali dalam proses bisnis dan kemudian mengambil tindakan korektif untuk menghilangkan atau memperbaikinya agar proses bisnis tidak terjadi lagi.

5.6 Perbedaan antara Audit Internal dengan Pengendalian Internal

Tabel berikut menunjukkan perbedaan Audit Internal dengan Pengendalian Internal (Nanda, 2022):

Karakteristik	Audit Internal	Pengendalian Internal
Definisi	Aktivitas konsultasi dan jaminan yang bersifat strategis yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan operasional bisnis	Kerangka kerja yang dibuat oleh manajemen dan karyawan perusahaan untuk memastikan pelaporan yang dapat

Karakteristik	Audit Internal	Pengendalian Internal
	disebut sebagai "audit internal."	diandalkan, operasi yang efektif, dan kepatuhan terhadap peraturan dikenal sebagai pengendalian internal.
Tujuan	Tujuan audit internal adalah sebagai berikut: • memastikan bahwa catatan akuntansi benar dan akurat, • memastikan bahwa standar akuntansi dipatuhi, • menemukan dan menghentikan penipuan, dan • memverifikasi kewajiban yang dibayarkan • untuk menemukan masalah operasi • mengusulkan solusi dan tindakan perbaikan.	Tujuan Pengendalian Internal adalah • untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, • menjaga aset, • memastikan pelaksanaan hukum yang ada, • mendeteksi dan mencegah penipuan, dan • memastikan bahwa hukum yang ditetapkan dipatuhi.
Klasifikasi	Audit internal adalah istilah yang kami gunakan untuk merujuk pada pekerjaan yang	Pengendalian internal dapat dilihat sebagai proses terstruktur.

Karakteristik	Audit Internal	Pengendalian Internal
	kami lakukan di dalam perusahaan.	
Verifikasi kerja	Pekerjaan seseorang ditinjau dan dinilai oleh orang lain selama audit internal.	Pengendalian internal melibatkan pemeriksaan dan penilaian setiap aspek aktivitas.

5.7 Kesimpulan

Semua pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan bekerja sama untuk membentuk sistem pengendalian internal perusahaan. Proses konsultasi dan penjaminan mutu yang dirancang secara strategis oleh manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi disebut "audit internal".

Terlepas dari perbedaan pendekatan keduanya yaitu pengendalian internal maupun audit internal, tetapi keduanya bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus mengurangi kerentanan perusahaan terhadap risiko.

****&****

DAFTAR PUSTAKA

- Bagaskara (2022) *Pengertian Audit Internal serta Tujuan dan Penerapannya*. Available at: <https://mutucertification.com/tujuan-penerapan-audit-internal/> (Accessed: 2 September 2024).
- Binus (2023) *Pentingnya Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan*. Available at: <https://accounting.binus.ac.id/2023/10/19/pentingnya-peran-auditor-internal-dalam-meningkatkan-efektivitas-pengendalian-internal-perusahaan/> (Accessed: 2 September 2024).
- Kenton, A. (2024) *Pengendalian Internal: Definisi, Jenis, dan Pentingnya*. Available at: https://www.investopedia-com.translate.google.com/terms/i/internalcontrols.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc (Accessed: 2 September 2024).
- Nanda, A. (2022) *Perbedaan antara Audit Internal dan Pengendalian Internal*. Available at: https://www.tutorialspoint-com.translate.google.com/difference-between-internal-audit-and-internal-control?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc (Accessed: 2 September 2024).
- Priharto, S. (2023) *Pengendalian Internal (Internal Control): Pengertian, Fungsi, Jenis, Komponen dan Contohnya*. Available at: <https://kledo.com/blog/pengertian-pengendalian-internal-control-adalah/>.
- Syarif (2016) *5 Filosofi "Kekinian" Audit Internal*. Available at: <https://spi.uin-alauddin.ac.id/5-filosofi-kekinian-audit-internal/> (Accessed: 2 September 2024).

BIODATA PENULIS



Nenny Syahreenny, S.E., M.Ak., Ak., CA, ACPA

Dosen Program Studi S1 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Penulis lahir di Surabaya pada tahun 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2004 dan S2 pada Magister Akuntansi konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Auditing, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008. Kemudian menempuh Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) untuk mendapat gelar Akuntan (Ak.) di Universitas Airlangga pada tahun 2009. Sebelum menjadi dosen, penulis adalah staf auditor di Kantor Akuntan Publik mulai tahun 2007. Beberapa buku penulis yang telah terbit adalah buku *Praktikum Pengauditan Pemrosesan Data Elektronik (PDE) Kasus: PT Nur Tahmida*, *Praktikum PDE Kasus: PT Central Kurma Indonesia*, *Praktikum PDE berbasis excel ATLAS Kasus : PT Rumah Sehat (RS) Al Afiyah*, *Praktikum PDE Kasus: PT Assakinah*, buku (*Chapter book*) *Akuntan Publik: Audit Laporan Keuangan*, buku (*Chapter book*) *Dasar-dasar Akuntansi*, buku (*Chapter book*) *Character Building for Professional: Karakter*

Penunjang Kesuksesan Profesional, buku (*Chapter book*) Sistem Akuntansi, buku (*Chapter book*) Analisa Laporan Keuangan, buku (*Chapter book*) Akuntansi Keuangan Menengah, buku (*Chapter book*) Akuntansi UMKM.

BIODATA PENULIS



Rizal Zaelani, SE., MM.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

Penulis lahir di Sukabumi tanggal 20 Juni 1971. Penulis adalah dosen tetap Program Akuntansi, Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Menyelesaikan pendidikan (S1) Jurusan Akuntansi serta melanjutkan (S2) Jurusan Manajemen Sumberdaya Manusia. Sedang Melanjutkan S3 Program Doktor Ilmu Manajemen Keuangan. Penulis menekuni bidang Menulis, Sejak kuliah, telah terlibat dalam penelitian dan menulis karya ilmiah. Salah satunya adalah mendapatkan hibah penelitian dari Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI. tahun 2020 dengan judul *Public Perceptions in Analyzing the Differences Between Cooperatives and Bank Emok in Sukabumi*, selanjutnya mendapatkan hibah penelitian pada tahun 2022 dengan judul *The Influence of Islamic Financial Literacy, Innovation and the Government on the Sustainability of MSMEs in Sukabumi City*.

Kegiatan penelitian dan penulisan juga masih tetap dilaksanakan sebagai pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi dengan menghasilkan jurnal ilmiah, diktat pengajaran seperti Berlatih Akuntansi Manajemen, dan saat ini Buku Akuntansi

Keuangan Menengah, Sistem Pengendalian Manajemen, Strategi Keuangan Perusahaan: Manajemen Modal Dan Struktur Modal, Perpajakan, & Membangun Fondasi Keuangan: Pengantar Praktis Untuk Akuntansi Dalam Bisnis tahun 2024 hingga saat ini.

BIODATA PENULIS



Rinda Fithriyana, S.SE., M.Ak.

Dosen Program Studi Kewirausahaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku
Tambusai

Penulis lahir di Bangkinang tanggal 31 Desember 1977. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi pada STIE YKPN Yogyakarta dan melanjutkan S2 Jurusan Akuntansi pada Universitas Riau.

BIODATA PENULIS



Ali Tofan, S.E., M.Ak., BKP.

Dosen & Praktisi Perpajakan

Penulis lahir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 15 November 1987. Penulis merupakan dosen Perguruan Tinggi Swasta dan merupakan praktisi perpajakan yang terdaftar di asosiasi profesi konsultan pajak Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Riwayat Pendidikan Penulis yaitu Diploma III di Universitas Gadjah Mada, S1 Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta serta Magister Akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur.

BIODATA PENULIS



Wedia Hastuti, S.E, M.M.

**Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Manajemen
STIE Bhakti Pembangunan**

Penulis lahir di Makassar tanggal 5 Juli 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Keuangan di Magister Manajemen Universitas Indonesia.

Pengalaman kerja, selama 8 tahun bekerja di Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dari tahun 1998-2006, kemudian 8 tahun di PT Earindo Consulting (Untuk project FSSC-PT Unilever Indonesia) 2006-2014, kemudian resign mendirikan usaha pribadi di bidang fashion busana wanita sampai dengan sekarang, dan pada tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai dosen tetap ilmu ekonomi manajemen di STIE Bhakti Pembangunan, penulis mengajar mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan 2, dan manajemen keuangan.

Selain mengajar penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan penulisan sebagai pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dengan menghasilkan jurnal ilmiah, diktat pengajaran dalam bidang akuntansi maupun manajemen keuangan.